

**RENCANA KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2026**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2026 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2026, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2026 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2026 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 21 Oktober 2025

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN
PAMEKASAN



MUHARRAM,ST

Pembina Utama Muda
NIP. 19680330 199803 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	61
2.3.1. Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	57
2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	57
2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional.....	58

2.3.4.	Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan.....	59
2.3.5.	Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026.....	60
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026.....	61
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	80
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	83
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	83
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	85
3.3	Program dan Kegiatan.....	88
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	122
BAB V	PENUTUP	138

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Faktor Penyebab Tidak Tercapai, Tercapai dan Capaian Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	16
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 Kabupaten Pamekasan.....	20
Tabel 2.3	Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	49
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan	56
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	67
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pamekasan	86
Tabel 3.1	Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pamekasan	89
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	91
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Pamekasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	94
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	121

BAB I

PENDAHULUAN

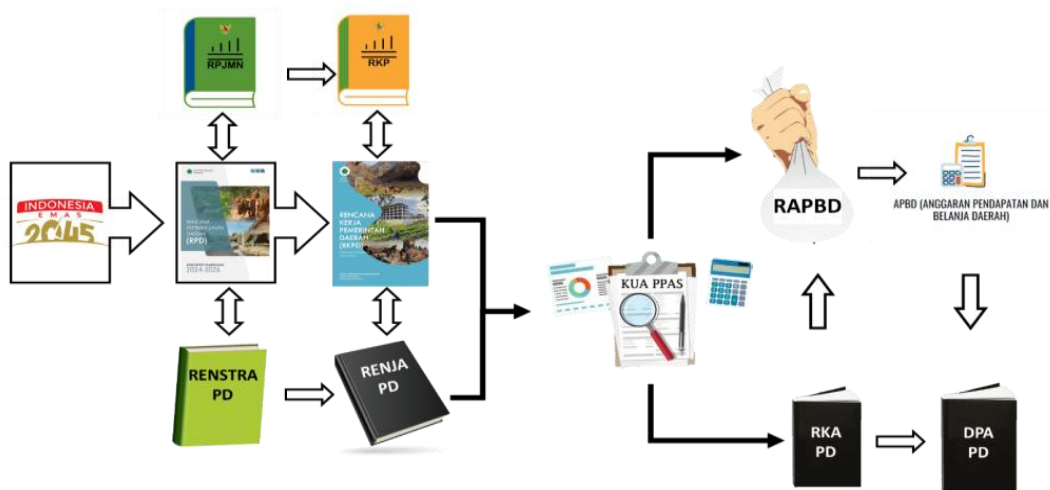
1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari Renstra. Dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah baik yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan memuat perencanaan tahunan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan sasaran penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Renja. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus merumuskan Renja secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan 2026 disusun berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya

berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 diperlukan untuk menjamin keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang berdasarkan pada evaluasi capaian. Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Secara umum, hubungan antar dokumen perencanaan, disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 1.1. Hubungan Dokumen RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun-tahun anggaran yang akan datang. Untuk menjamin bahwa perencanaan pembangunan tidak melenceng dari tujuan pembangunan jangka panjang, Pemerintah Daerah menyusun beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait, terdiri dari RPJPD, RPJMD/ RPD, dan RKPD. RPJPD merupakan dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun. Selanjutnya, RPJMD menjabarkannya dalam arah pembangunan tiap lima tahun.

RPJMD kemudian dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran tahunan dalam bentuk RKPD, sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga. Selain itu, RKPD juga diserasikan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang dan Perumahan Rakyat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023-2043;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 7);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3);
 28. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan; dan

29. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 62 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dengan periode 5 (lima) tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara umum dilingkup Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Maksud disusunnya Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan 2026 adalah untuk dijadikan dasar serta acuan bagi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan adalah:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- d. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan sesuai dengan kewenangannya.

- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematikan Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan yang memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat informasi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang kerangka pendanaan per triwulan dari rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan penting substantial, kaidah pelaksanaan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan dilapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni tahun 2026.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, dan hasil rencana program, kegiatan dan sub kegiatan. Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi isu permasalahan terkini yang perlu diatasi dengan mengkaji ;
- b. Penetapan tujuan yang realistis dan terukur;
- c. Identifikasi program-program prioritas yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
- d. Penyusunan anggaran yang realistis dan efisien sesuai dengan prioritas program dan kegiatan;
- e. Identifikasi mitigasi risiko yang mungkin menghambat pelaksanaan program dan menyusun strategi untuk menghadapi risiko yang tidak terduga;
- f. Menyusun indikator kinerja utama baru untuk bidang pertanahan;
- g. Penggunaan teknologi dan Inovasi dalam penyelesaian masalah perumahan dan permukiman;
- h. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dari hasil evaluasi dan realisasi pelaksanaan renja yang tidak melebihi target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan
2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Skala Permukiman
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Lingkungan

4. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan dan Kawasan Strategis Lainnya.
5. Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
6. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh melalui Perbaikan RTLH

Beberapa program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diatas tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Pengesahan PAK yang mepet dengan akhir tahun dimana proses survey dan pengadaan barang dan jasanya membutuhkan waktu sekitar 60 hari kerja, sehingga yang dapat dikerjakan hanyalah proses perencanaannya saja.
2. Kondisi medan yang berat, rumah yang sudah layak, dan calon penerima bantuan yang tidak siap berswadaya
3. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang ada, termasuk kurangnya tenaga ahli yang kompeten dan professional
4. Keterbatasan teknologi dan inovasi
5. Monitoring dan Evaluasi yang masih kurang dalam menindaklanjuti temuan hasil evaluasi.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.
3. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.

Beberapa program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diatas dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Ketersediaan anggaran dari pemerintah yang memadai
2. Kondisi cuaca yang mendukung serta ketersediaan material dan para pekerja bangunan yang terpenuhi
3. Lokasi yang sesuai dengan SK Kekeringan, SK Lokus Stunting dan SK Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan
4. Dukungan dari desa dalam ketepatan penentuan lokasi.
5. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompeten sehingga pelaksanaan kegiatan bisa berjalan efektif dan efisien.

Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dari hasil evaluasi yang telah melebihi capaian target kinerja yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

Beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diatas yang capaiannya melebihi target dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Antusias Pemohon Untuk Mengurus PBG dan SLF baik secara online maupun offline.

Tabel 2.1
Faktor Penyebab Tidak tercapai, tercapai dan capaian melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

NO.	PROGRAM	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TIDAK SESUAI TARGET	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI TARGET	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN MELEBIH TARGET	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kondisi cuaca yang buruk, ketersediaan material bangunan dan pekerja bangunan yang tidak terpenuhi	Kondisi cuaca yang baik, material yang tersedia dan jumlah pekerja bangunan yang terpenuhi		mempersiapkan perencanaan dokumen anggaran dan kegiatan lebih matang lagi
		Masyarakat yang tidak mampu berswadaya sehingga memilih mundur bahkan setelah CPB sudah ditetapkan			Memastikan hari pelaksanaan kegiatannya disesuaikan dengan ketersediaan material bangunan dan para pekerjanya
2	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Lokasi kegiatan yang berubah-ubah	Lokasi kegiatan yang sesuai dengan SK Kekeringan dan SK stunting		Lokasi kegiatan dan anggarannya diharapkan sudah fix sebelum masuk dalam tahap penyusunan DPA
		Terbatasnya ketersediaan titik air pengeboran air bersih di beberapa lokasi	Ketersediaan sumber air pada lokasi kegiatan		Menggunakan teknologi yang tepat dalam metode konstruksi pengeboran air bersih
		Pengesahan PAK yang terlalu mepet sehingga pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan	Tidak ada perubahan target kinerja dan anggaran pada kegiatan tersebut sehingga capaian kegiatan berjalan sesuai rencana		Pengesahan PAK diharapkan pada pertengahan tahun anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan

NO.	PROGRAM	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TIDAK SESUAI TARGET	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI TARGET	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN MELEBIH TARGET	SOLUSI YANG DILAKUKAN
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pembangunan IPLT tidak dapat terlaksana karena masih menunggu hasil kajian dokumen RISPAM dan SSK	Konsistensi target kinerja dan anggaran kegiatan sehingga hasil kegiatan dapat tercapai		Menyusun dokumen RISPAM dan SSK sebagai dokumen induk pengelolaan air limbah ke depannya
4	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Pengesahan PAK yang terlalu mepet sehingga pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan			Pengesahan PAK diharapkan pada pertengahan tahun anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Pengesahan PAK yang terlalu mepet sehingga pelaksanaan kegiatan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan			Pengesahan PAK diharapkan pada pertengahan tahun anggaran sehingga kegiatan bisa dilaksanakan
6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Koordinasi yang baik dalam pengumpulan baseline data di lingkungan unit kerja maupun diluar unit kerja sehingga penyusunan dokumen RP2KPKPK bisa terlaksana dengan baik		pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan teknis kegiatan dapat dilakukan lebih awal agar pekerjaan revisi mempunyai waktu yang cukup
			Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam hal ini tenaga ahli/konsultan		

NO.	PROGRAM	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN TIDAK SESUAI TARGET	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN SESUAI TARGET	FAKTOR CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN MELEBIH TARGET	SOLUSI YANG DILAKUKAN
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Perencanaan dokumen teknis yang matang dan tersedianya tenaga ahli/konsultan yang berkualitas serta ketersediaan anggaran yang cukup	Antusias pemohon yang tinggi untuk mengurus PBG dan SLF baik secara online maupun offline	memaksimalkan akses informasi pemenuhan administrasi permohonan mengurus PBG/SLF baik secara online(website SIMBG) maupun offline (konsultasi langsung dengan petugas yang ada di Mall Pelayanan Publik)
8	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	belum ada pengembang yang sudah memenuhi persyaratan penyerahan PSU dalam hal ini pengembang belum memiliki akte pelepasan hak atas tanah dari notaris.			Mendorong pengembang untuk segera menyelesaikan berkas administrasi sebagai syarat penyerahan PSU ke pihak PemKab
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Jumlah peserta pelatihan ada beberapa yang mundur dikarenakan waktu pelaksanaannya dan penyusunan laporan yang harus dibuat oleh peserta sebagai syarat lulus sertifikasi pelatihan			Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan lebih awal dengan menyebarkan informasi berupa brosur terkait pelatihan tenaga terampil konstruksi melalui Asosiasi (GAPEKSI) serta untuk menaikkan jenjang skema sertifikasi dan jumlah peserta dari jenjang 4 (tenaga kerja konstruksi) ke jenjang 5 (Penanggung Jawab Sub Klasifikasi Badan Usaha) dan jenjang 6 (Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha) diperlukan penambahan anggaran karena biaya sertifikasinya yang mahal

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 2023 (tahun berjalan)
Kabupaten Pamekasan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %	98,42 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	98,18 %	98,18%
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4 Perencanaan	4 Perencanaan	4 Perencanaan	4 Perencanaan	100,00 %	4 Perencanaan	4 Perencanaan	100,00%

1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Doku men	3 Doku men	3 Doku men	3 Doku men	100,00 %	3 Doku men	2 Doku men	66,67%
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	59 Doku men	59 Doku men	55 Doku men	55 Doku men	100,00 %	52 Doku men	52 Doku men	100,00%
1.04.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	20 Doku men	20 Doku men	55 Doku men	55 doku men	100,00 %	52 Doku men	52 Doku men	100,00%
1.04.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Doku men	3 Doku men	3 Doku men	3 doku men	100,00 %	3 Lapor an	2 Lapor an	66,67%
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100,00 %	100 %	100% %	100,00%
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100,00 %	1 unit	1 unit	100,00%

		kualitas baik											
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang /Bulan	33 Orang/Bulan	33 Orang /Bulan	33 Orang /Bulan	100,00 %	39 Orang /bulan	39 Orang/bulan	100,00%			
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan kompetensi aparatur	80 %	49,81 % 1320 75	80 %	44,0 % 0	55,00%	80 %	13,97 %	17,46%			
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	0 Aparatur	0 Aparatur	60 Aparatur	33 Aparatur	55,00%	63 Orang	11 Orang	17,46%			
1.04.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Aparatur	0 Aparatur	60 Aparatur	33 Aparatur	55,00%	63 Orang	11 Orang	17,46%			
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana prasarana yang terpenuhi	100 %	87,61 %	100 %	76,7 % 9	76,79%	100 %	60,12 %	60,12%			
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	5 Sarana	5 Sarana	5 Sarana	5 Sarana	100,00 %	5 Sarana	4 Sarana	80,00%			
1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	100,00 %	7 Paket	0 Paket	0,00%			

		Disediakan								
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Paket	72 Paket	72 Paket	42 Paket	58,33%	50 Paket	20 Paket	40,00%
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	89 Paket	64 Paket	89 Paket	38 Paket	42,70%	9 Paket	2 Paket	22,22%
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	100,00%	5 Paket	4 Paket	80,00%
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	79 Laporan	80 Laporan	77 Laporan	96,25%	40 Laporan	15 Laporan	37,50%
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	1 Prasarana	1 Prasarana	1 Prasarana	1 Prasarana	100,00%	1 Prasarana	1 Prasarana	100,00%
1.04.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 unit	15 unit	78 unit	16 unit	20,51%	55 unit	5 unit	9,09%
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan	3 Jasa Penu	3 Jasa Penu	3 Jasa Penu	3 Jasa Penu	100,00	3 Jasa Penun	2 Jasa Penu	66,67%

	Urusan Pemerintahan Daerah	yang disediakan	njang	njang	njang	njang	%	jang	njang	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00 %	2 Laporan	0 Laporan	0,00%
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	217 Laporan	200 Laporan	217 Laporan	217 Laporan	100,00 %	217 Laporan	162 Laporan	74,65%
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100,00 %	38 Laporan	30 Laporan	78,95%
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	3 Pemeliharaan	3 Pemeliharaan	3 Pemeliharaan	3 Pemeliharaan	100,00 %	3 Pemeliharaan	1 Pemeliharaan	33,33%
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100,00 %	5 Unit	5 Unit	100,00%
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	148 Unit	140 Unit	100 Unit	92 Unit	92,00%	72 Unit	0 Unit	0,00%

1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	19 Unit	16 Unit	19 Unit	8 Unit	42,11%	19 Unit	0 Unit	0,00%
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	80 %	75,7 %	67,09 %	63,68 %	94,92%	67,59 %	21,43 %	31,71%
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	7 SPAM	7 SPAM	7 SPAM	4 SPAM	57,14%	6 SPAM	4 SPAM	66,67%
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	2 dokumen	2 dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	50,00%	2 Dokumen	1 Dokumen	50,00%
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	21 Liter/ Detik	19 Liter/ Detik	71 Liter/ Detik	66 Liter/ Detik	92,96%	70 Liter/ Detik	14 Liter/ Detik	20,00%
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	192 Liter/ Detik	157 Liter/ Detik	89 Liter/ Detik	63 Liter/ Detik	70,79%	63 Liter/ Detik	23 Liter/ Detik	36,51%

		yang dibangun								
1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100,00 %	1 Unit	0 Unit	0,00%
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	10 Unit	7 Unit	32 Unit	28 Unit	87,50%	1 Unit	0 Unit	0,00%
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	940 SR	895 SR	495 SR	495 SR	100,00 %	10 SR	0 SR	0,00%
	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2 Kelompok Masyarakat	4 Kelompok Masyarakat	18 Orang	0 Orang	0,00%	0 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	0,00%
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Sistem Air Limbah yang Dikelola	67,6 %	67,23 %	95,2 %	94,5 %	99,33%	95,5 %	%	0,00%

	SISTEM AIR LIMBAH	dan Dikembangkan	5		2	8				
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	2 SPAL D	2 SPAL D	6 SPAL D	6 SPAL D	100,00 %	9 SPAL D	6 SPAL D	66,67%
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	1 Doku men	0 Doku men	2 Doku men	2 Doku men	100,00 %	6 Doku men	1 Doku men	16,67%
1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	jumlah sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala yang direhabilitasi/ditingkatkan	100 Ruma h Tangg a	100 Ruma h Tang ga	30 M3/H ari	30 M3/ Hari	100,00 %	76,4 M ³ / 2 Hari	18,24 M ³ / Hari	23,87%
1.03.05.2.01.07	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM Teknik pengelolaan air limbah domestik yang dibina	35 Orang	35 Oran g	35 Orang	35 Orang	100,00 %	35 Orang	35 Oran g	100,00%
1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan penyediaan sistem pengelolaan air limbah	17 Kelo mpok	17 Kelo mpok	5 Desa	5 Desa	100,00 %	17 Desa	17 Desa	100,00%

		domestik								
1.03.05.2.01.09	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SDM lembaga pengelola air limbah domestik yang dikembangkan	70 Orang	70 Orang	1 Penyelektara	1 Penyelektara	100,00 %	1 Penyelenggaraan	1 Penyelenggaraan	100,00%
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dipelihara	2 Unit	0 unit	2 Unit	2 Unit	100,00 %	2 Unit	0 Unit	0,00%
1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dibangun	890 Rumah Tangga	890 Rumah Tangga	221 M3/Hari	221 M3/Hari	100,00 %	96 M ³ /Hari	35,52 M ³ /Hari	37,00%
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun						1 M ³ /Hari	0 M ³ /Hari	0,00%
1.03.05.2.01.0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi						1 Unit	0 Unit	0,00%
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Sistem Drainase yang Dikelola dan Dikembangkan	52,25 %	45,10495511 %						

		Luasan genangan air wilayah perkotaan			249,87 Ha	249,64 Ha	99,91%	241,71 Ha	0 Ha	0,00%
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	3 Sistem Drainase	3 Sistem Drainase	2 Sistem Drainase	2 Sistem Drainase	100,00%	2 Sistem Drainase	0 Sistem Drainase	0,00%
1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah sisten drainase lingkungan yang dibangun	9283 M	7985,48 M	1176 M	1.135 M	96,51%	4878 M	0 M	0,00%
1.03.06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	jumlah saluran drainase lingkungan yang direhabilitasi	518 M	475,26 M	3 Sistem Drainase Lingkungan	3 Sistem Drainase Lingkungan	100,00%	15 Sistem Drainase Lingkungan	0 Sistem Drainase Lingkungan	0,00%
1.03.06.2.01.16	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	- Dokumen	0,00%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung yang tertata	30 %	34,24 %	33,3 %	33,9 %	101,78 %	33,3 %	28,57 %	85,72%

1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2	Penye lengg araan	2	Peny eleng garaan	2	Penye lengg araan	2	Penye lengg araan	100,00 %	2	Penye lengg araan	2	Peny eleng garaan	100,00%
1.03.08.2.01 .0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200	Doku men	234	Doku men	200	Doku men	244	Doku men	122,00 %	200	Doku men	172	Doku men	86,00%
1.03.08.2.01 .0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5	Doku men	5	Doku men	3	Doku men	2	Doku men	66,67%	3	Doku men	2	Doku men	66,67%

1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungannya yang tertata	40 %	40,00 %	33,33 %	32,89 %	98,69%	33,33 %	18,23 %	54,70%
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	1 Penataan Bangunan	1 Penataan Bangunan	1 Penataan Bangunan	1 Penataan Bangunan	100,00 %	1 Penataan Bangunan	1 Penataan Bangunan	100,00%
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan	3 Kawasan	535 Kawasan	528 Kawasan	98,69%	691 Kawasan	378 Kawasan	54,70%
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil yang Bersertifikat di Bidang Jasa Konstruksi	24 %	14,1 %						
		<i>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</i>			92,16 %	114,28 %	124,00 %	94,83 %	0% %	0,00%
		<i>Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa</i>			100 %	60,70 %	60,70%	100 %	0% %	0,00%

		kecelakaan konstruksi									
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	2 Penyelenggaraan	2 Penyelenggaraan	2 Penyelenggaraan	100,00 %	2 Penyelenggaraan	0 Penyelenggaraan	0,00%	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	150 Orang	51 Orang	100 Orang	88 Orang	88,00%	90 Orang	0 Orang	0,00%	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	150 Orang	59 Orang	100 Orang	160 Orang	160,00 %	125 Orang	0 Orang	0,00%	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	57,14 %	65,71 %	71,14 %	43,18 %	60,70%	85,14 %	0 %	0,00%	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	0 Laporan	0 Laporan	100 Paket Pekerjaan	48 Paket Pekerjaan	48,00%	100 Paket Pekerjaan	0 Paket Pekerjaan	0,00%	

1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	100 Orang	115 Orang	100 Lembaga	74 Lembaga	74,00%	100 Lembaga	0 Lembaga	0,00%
1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Prosentase Rumah Layak Huni	96,2 % 7	85,57 %						
		<i>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</i>			22,2 % 2	11,6 % 4	52,39%	33,3 % 3	15 %	45,00%
		<i>Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota</i>			22,2 % 2	0 %	0,00%	33,3 % 3	0 %	0,00%

1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	100 %		40,39 %	11,82146341 %	29,27%	55,5 %	25 %	45,00%
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	jumlah rumah bagi korban bencana yang diperbaiki	25 Unit Rumah		41 Unit	12 Unit	29,27%	20 Unit	9 Unit	45,00%
1.04.02.2.03.06	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	20 Unit Rumah							
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Prosentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang tertangani	94,00 %	83,56 %	100 %	83,33 %	83,33%	20 %	7,5 %	37,50%
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	100 %	100 %	100 %	0 %	0,00%	66,67 %	0 %	0,00%
1.04.03.2.02.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	4,00 Dokumen	4,00 Dokumen						

	Kumuh	yang disusun								
	<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik</i>	<i>Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik</i>			1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	1 kawasan	100,00 %	1 kawasan	0 kawasan	0,00%
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen						

	<i>Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP</i>	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi</i>			2 Doku men	2 Doku men	100,00 %	3 Doku men	0 Doku men	0,00%
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	2 Penin gkata n Kualit as	2 Penin gkata n Kuali tas	1 Penin gkata n Kualit as	1 Penin gkata n Kuali tas	100,00 %	1 Penin gkata n Kualit as	1 Penin gkata n Kuali tas	100,00%
	<i>Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh</i>	<i>Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh</i>	1 Doku men	1 Doku men						
1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh yang diselenggarakan	3 Koord inasi	3 Koor dinasi	3 Lapor an	3 Lapor an	100,00 %	3 Lapor an	3 Lapor an	100,00%
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Prosentase Rumah Layak Huni dan Luasan Kawasan Permukiman Kumuh	95,8 %	89,90 %	96,0 % 4	95,9 % 121 171 8	99,87%			

1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	1 Perbaikan RTLH	1 Perbaikan RTLH	1 Perbaikan RTLH	1 Perbaikan RTLH	100,00 %	1 Perbaikan RTLH	1 Perbaikan RTLH	100,00%
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	349 Unit Rumah	347 Unit Rumah	285 Unit Rumah	285 Unit Rumah	100,00 %	38 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0,00%
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase PSU yang ditingkatkan	100 %	0 %	16,6 % 7	8,34 %	50,00%	66 %	0 %	0,00%
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	77,7 % 7	0 %	33,3 % 3	16,6 % 65	50,00%	66,6 % 7	0 %	0,00%
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	jumlah koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang	3 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50,00%	1 Laporan	0 Laporan	0,00%

		dilakukan								
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah			33,3 % 3	0 %	0,00%	66,6 % 7	0 %	0,00%
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan			1 Koord inasi	0 Koor dinasi	0,00%	1 Koord inasi	0 Koor dinasi	0,00%
2.10.05.2.01 .0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1 Doku men	0 Doku men	0,00%	1 Doku men	0 Doku men	0,00%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan (2024)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	33.33%	29.06%	87.19%
	Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi	33.33%	30.69%	92.08%
Meningkatnya Lingkungan Permukiman yang sehat	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98.14%	94,62%	96,42%
	Prosentase penurunan luasan kawasan kumuh	100%	98.51%	98.51%
	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	58,53%	55.56%	94.92%
	Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak, perkotaan dan perdesaan	68,65%	66.65%	97.09%
Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	85	81.80	96.24%

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung

Indikator "prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung" mengukur tingkat kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku dalam pembangunan, pengoperasian, serta pemeliharaan bangunan gedung. Indikator ini mencakup berbagai aspek seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta kepatuhan terhadap standar teknis dan keselamatan bangunan. Implementasi PBG diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bangunan yang dibangun memenuhi standar teknis yang ditetapkan, serta memastikan bahwa bangunan tersebut aman digunakan. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menyatakan bahwa suatu bangunan gedung sudah memenuhi standar teknis, keselamatan, dan kelayakan untuk digunakan sesuai fungsinya. Implementasi penerbitan SLF dilaksanakan setelah bangunan selesai dibangun dan siap digunakan.

Dalam kegiatan ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memberikan rekomendasi penilaian terkait kesesuaian fungsi bangunan gedung untuk kemudian dilanjutkan ke Dinas PMPTSP yang akan menerbitkan dokumen PBG dan SLF tadi. Capaian indikator dihitung berdasarkan persentase jumlah bangunan gedung yang memiliki PBG dari target bangunan gedung ber-PBG pada tahun n. rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

Persentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	=	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung yang ber-IMB}}{\text{Jumlah target bangunan}} \times 100\%$
---	---	---

Capaian kinerja pada indikator sasaran prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung bisa dikatakan masuk dalam kategori Cukup Baik karena capaian kinerjanya 88% dari target kinerja 200 dokumen PBG berhasil di realisasikan sebanyak 176 dokumen PBG yang terbit di tahun 2024. Meskipun ada selisih 12% atau 24 dokumen PBG dari target, ini harus dilihat sebagai kesempatan untuk meningkatkan efektivitas, dan dengan strategi yang tepat, pencapaian target bisa terwujud. Jumlah masyarakat atau pemohon untuk mengurus PBG dan SLF dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan bangunan gedung tahun 2024 tidak sebesar pada tahun sebelumnya dimana realisasi penerbitan dokumen PBG lebih besar daripada target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerjanya bisa melebihi 100%.

Target dan Realisasi PBG

2022		2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
200	244	200	234	200	176

Sumber data : Form E-81 Monev Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 dan tahun 2023 realisasi kinerjanya semakin turun namun masih melebihi dari target dokumen PBG yang akan diterbitkan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 realisasinya juga semakin turun bahkan tidak

mencapai target 200 dokumen yang ditetapkan pada tahun tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya PBG dan proses pengajuannya. Masih banyak masyarakat atau pemilik bangunan gedung yang tidak tahu atau kurang paham dalam pengajuan PBG, kurang pahamnya pemohon terhadap penggunaan aplikasi SIMBG sehingga mengakibatkan lamanya proses permohonan dan rendahnya jumlah pengajuan. Solusinya pemohon dapat berkonsultasi dengan petugas di Mall Pelayanan Publik yang sudah ditugaskan khusus melayani permohonan PBG. Dilihat dari capaian anggarannya sebesar 69,3% ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran yang digunakan lebih rendah namun kinerja yang dicapai sudah lebih tinggi sehingga bisa diartikan ada upaya peningkatan kualitas kerja atau pencapaian tujuan yang lebih efisien meskipun sumber dayanya terbatas. Adapun tingkat efisiensinya setelah diketahui besaran capaian kinerja dan capaian anggarannya yaitu sebesar 27,01%. Adapun saran atau rekomendasi perbaikan ke depannya yaitu dengan optimalisasi sistem perizinan daring (online single submission persetujuan bangunan gedung) yang lebih ramah pengguna dan peningkatan kapasitas SDM Pengawasan di lapangan sehingga harapannya capaian kinerja di tahun depan bisa lebih meningkat daripada capaian tahun 2024.

Indikator sasaran ini tidak memiliki pembanding dengan target nasional dan target provinsi dikarenakan tidak termasuknya indikator sasaran ini pada salah satu sasaran strategis nasional terkait infrastruktur pelayanan dasar. Setiap daerah memiliki prioritas pembangunan yang berbeda-beda

sehingga indikator sasaran ini mungkin lebih fokus pada kondisi lokal, sumber daya serta sistem evaluasi yang lebih spesifik dan terfokus pada kebutuhan dan kondisi daerah Kabupaten/Kotanya. Berikut adalah dokumentasi dokumen berita acara PBG yang di rekomendasikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan dokumen PBG yang sudah diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi.

Suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif (status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan IMB) dan persyaratan teknis (persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung) sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan. Indikator sasaran ini mengukur tingkat keberhasilan pemenuhan standar kualitas dan kelayakan fungsi bangunan gedung pemerintah. Gedung yang "berkualitas" diartikan sebagai bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan untuk digunakan. Sementara itu, "laik fungsi" berarti gedung tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya tanpa gangguan atau resiko keselamatan. Program pendukung Indikator sasaran ini yaitu program penataan bangunan gedung, dan program pengembangan jasa konstruksi. Capaian kinerja pada indikator sasaran ini bisa dikatakan cukup baik dengan capaian kinerja 92,08%. Pada program penataan bangunan gedung tahun 2024 sudah terealisasi 9 gedung kantor pemerintahan dan satu gedung kawasan monumen arek lancor yang direhabilitasi dan direnovasi. Pembangunan Rumah Dinas Kejaksaan Negeri

Pamekasan juga sudah terealisasi mulai dari perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan pengawasannya.

Capaian kinerja pada indikator sasaran ini juga dipengaruhi oleh program pengembangan jasa konstruksi dimana program ini merupakan penunjang tercapainya indikator sasaran tersebut. Kinerja program penataan bangunan gedung akan sangat bergantung pada kualitas jasa konstruksi yang digunakan. Jika program pengembangan jasa konstruksi berhasil meningkatkan kualitas tenaga kerja dan standar praktik konstruksi, maka bangunan yang ditata atau direnovasi akan lebih berkualitas, tahan lama, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pengembangan sumber daya manusia dan inovasi dalam konstruksi akan mendukung tercapainya bangunan gedung yang berkualitas, aman, dan laik fungsi. Sebaliknya, penataan bangunan gedung yang efektif akan memberikan peluang bagi jasa konstruksi untuk berkembang dengan lebih baik, menciptakan permintaan yang lebih tinggi akan tenaga terampil dan standar konstruksi yang lebih ketat. Pada program pengembangan jasa konstruksi ada beberapa kegiatan yang targetnya tidak tercapai seperti pada kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis, Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi, serta Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota.

rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi ::	$= \frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$
--	--

Pada kegiatan pelatihan tenaga kerja konstruksi jenjang 5 dan jenjang 6 tahun 2024, peserta yang mengikuti pelatihan melebihi dari target 100 orang yaitu 160 orang, namun pada hari kedua saat uji sertifikasinya ada yang beberapa tidak hadir dengan alasan sakit, dll, sehingga dari target 100 orang, yang bisa ikut uji sertifikasi dan dinyatakan lulus ada 88 orang. Pada kegiatan pembinaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi dari target 100 lembaga jasa konstruksi yang dibina tertib usahanya hanya terealisasi 74 lembaga. Pada kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi Kabupaten/Kota hanya terealisasi 48 paket pekerjaan jasa konstruksi yang diawasi dan dievaluasi dari target 100 paket pekerjaan. Hal-hal tersebut diatas bisa mempengaruhi hasil capaian kinerja dari indikator sasaran prosentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi, karena program pengembangan jasa konstruksi memiliki kontribusi langsung terhadap kinerja program penataan bangunan dan gedung dimana semakin terampil dan kompetennya tenaga kerja konstruksi akan menghasilkan konstruksi dan renovasi bangunan yang lebih baik, lebih aman dan sesuai dengan fungsinya. Solusi ke depannya untuk kegiatan yang belum tercapai target kinerja terutama dalam kegiatan pengawasan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu akan melakukan kegiatan studi tiru ke Dinas Serumpun di Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur yang gradenya A dan sudah melakukan kegiatan pengawasan dan juga membuat aplikasi yang berkaitan dengan pelaporan kegiatan pengawasan yang memuat data company profil dari badan usaha.

**Perbandingan Capaian Kinerja Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung
Pemerintah yang Berkualitas/Laik Fungsi**

TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
59,30%	94,00%	70,54%	92,08%

Berdasarkan pada tabel diatas, Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 mengalami peningkatan dimana capaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu 70,54% namun menurun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar 94,00%. Meskipun sudah ada peningkatan yang signifikan Dinas tetap akan melakukan monitoring dan evaluasi kinerja ke depannya untuk semakin meningkatkan kinerja yang lebih efektif lagi. Rekomendasi perbaikan untuk tahun depan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi bekerja sama dengan LPJK, Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, memberdayakan penyedia jasa lokal melalui pelatihan manajemen proyek serta pengadaan barang/jasa pemerintah, serta membentuk tim pengendali mutu konstruksi internal dinas, yang melibatkan tenaga teknis bersertifikat untuk pengawasan setiap proyek strategis.

Indikator sasaran ini juga tidak memiliki pembandingan dengan target nasional dan target provinsi dikarenakan bukan termasuk dalam sasaran strategis terkait infrastruktur pelayanan dasar. Selain itu tidak adanya pembandingan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi spesifik daerah, kebijakan, serta keterbatasan teknis dan sumber daya.

Tingkat Efisiensi pada indikator sasaran prosentase pemenuhan pembangunan gedung pemerintah yang

berkualitas/laik fungsi bergantung pada keseimbangan antara capaian kinerja dan capaian anggaran. Jika capaian kinerja tinggi dengan anggaran yang optimal, efisiensi dianggap baik. Namun, jika anggaran terserap tinggi tetapi output rendah, berarti terjadi pemborosan. Pada indikator sasaran ini capaian anggaran yang terserap yaitu sebesar 61,44% dimana capaian kinerjanya sudah mencapai 92,08%. Hal ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pemanfaatan anggaran, namun pada kenyataannya tingkat efisiensi yang mencapai 30,64% ini terjadi karena faktor sementara seperti keterlambatan pembayaran atau gagal bayar di tahun 2024.

3. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

indikator sasaran ini merupakan cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya. Penyelenggaraan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dimana sasaran dari kegiatan ini adalah MBR (Masyarakat Berpenghasilan rendah) dan/atau keluarga miskin yang menempati rumah yang tidak layak untuk dihuni. Persyaratan penerima bantuan penyelenggaraan kegiatan RTLH ini yaitu memiliki KTP/Identitas diri yang berlaku, memiliki/menguasai sebidang tanah yang cukup yang dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik yang sah, belum memiliki rumah, belum pernah memperoleh bantuan perbaikan rumah darimanapun, berpenghasilan paling besar senilai upah minimum Kabupaten, Bersedia swadaya, bersedia menyelesaikan kegiatan perbaikan RTLH hingga dapat dihuni secara layak, dan bersedia menghuni

kembali rumah yang telah diperbaiki setelah selesai. Besaran bantuan penyelenggaraan kegiatan perbaikan RTLH untuk setiap penerima bantuan sebesar Rp. 17.500.000 yang digunakan untuk pembelian material bahan bangunan (Rp. 15.000.000) dan pembayaran upah kerja (Rp. 2.500.000).

Program yang mendukung capaian indikator sasaran ini adalah Program Pengembangan Perumahan dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dimana salah satu program tersebut merupakan Program yang mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan jenis pelayanan dasarnya yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Total rumah yang telah dilaksanakan perbaikan terhadap rumah yang tidak layak huni tahun 2024 yaitu sejumlah 527 unit rumah termasuk rumah yang terdampak bencana, TMMD (Tentara Manunggal Masuk Desa) rumah BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), sehingga rumah layak huni semakin bertambah dari yang sebelumnya sejumlah 214.950 rumah menjadi 215.477 rumah yang layak huni dan jumlah rumah tidak layak menjadi berkurang dari 4.845 RTLH menjadi 4.318 dari total rumah kabupaten pamekasan tahun 2024 yaitu sebesar 271.111 unit rumah. Berikut adalah formulasi perhitungan indikator capaian ketersediaan rumah layak huni :

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	=	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Seluruh Rumah}} \times 100\%$
--	----------	---

Capaian kinerja dari indikator sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu 96,41% dimana dari target kinerja 98,14% terealisasi sebesar 94,62%. Hal tersebut disebabkan karena realisasi pada kegiatan SPM (Program Pengembangan Perumahan) hanya terealisasi 11 rumah dari target 21 unit rumah yang diperbaiki pasca bencana sehingga pemenuhan SPM nya tidak mencapai 100%. Khusus program yang berkaitan dengan SPM Perumahan Rakyat ini diperlukan evaluasi dan strategi yang lebih efektif untuk dapat menetapkan target perbaikan RTLH bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah, karena tantangannya adalah bencana alam yang tidak bisa diprediksi kejadiannya. Sedangkan pada Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh target unit rumah yang diperbaiki 285 unit sudah terealisasi semua atau tercapai 100% kinerjanya.

Perbandingan Capaian Kinerja Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni

TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
96,00%	96,79%	94,79%	96,73%

Dari data yang ditampilkan diatas dapat kita lihat trend kenaikan capaian kinerja pada tahun 2022 dan penurunan capaian kinerja di tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini menunjukkan jumlah perbaikan rumah tidak layak huni semakin sedikit setiap tahunnya, tidak seperti pada tahun 2022 dimana program RTLH yang menjadi program prioritas Bupati tersebut mendapatkan anggaran yang prioritas juga.

Pendanaan yang terbatas pada tahun 2023 dan 2024 ini menunjukkan penurunan jumlah target perbaikan RTLH.

Perbandingan Target Nasional dengan Provinsi dan Kab/Kota

Target Nasional	Capaian Nasional	Target Provinsi	Capaian Provinsi	Target Kab/Kota	Capaian Kab/Kota
70,00%		75,44%	73.40%	98,14%	94,93%

Perbedaan target diatas ini mencerminkan adanya perbedaan dalam prioritas pembangunan, kapasitas sumber daya, dan konteks lokal yang dihadapi oleh masing-masing tingkat pemerintahan. Selain itu tantangan di tingkat nasional dan tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota berbeda. Meskipun targetnya lebih rendah, tantangan yang dihadapi nasional lebih besar, lebih beragam dan lebih kompleks dibandingkan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada indikator sasaran cakupan ketersediaan rumah layak huni memiliki tingkat efisiensi yang baik karena capaian kinerjanya lebih besar dibandingkan capaian anggarannya yaitu sebesar 86,11%, sehingga tingkat efisiensi pada indikator sasaran ini yaitu 10,31%. Meskipun efisiensi kinerja indikator ini sudah baik, namun masih diperlukan upaya untuk semakin meningkatkan efisiensi program perbaikan RTLH ini selain dengan optimalisasi anggaran juga perlu menggandeng sektor swasta, LSM dan masyarakat untuk berpartisipasi juga dalam program RTLH ini sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program ini. Rekomendasi lainnya yaitu dengan Validasi dan pemutakhiran data RTLH berbasis desa/kelurahan dengan pendekatan partisipatif, Peningkatan

alokasi dana RTLH dari APBD dan upaya sinergi dengan program pusat (BSPS dari Kementerian PUPR), serta mendorong kolaborasi CSR dari sektor swasta dan BUMDes dalam pembangunan/perbaikan rumah layak huni seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

4. Prosentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

Permukiman kumuh merupakan kawasan dengan kondisi lingkungan permukiman yang mengalami penurunan kualitas lingkungan secara fisik, social, ekonomi dan budaya. Maka dengan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dapat mengurangi dan menurunkan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Pamekasan. Peningkatan kualitas lingkungan yang dilaksanakan yaitu melalui Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya dan penyusunan dokumen RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) sebagai dokumen perencanaan teknisnya. Kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya ini berupa pembangunan jalan lingkungan atau pavingisasi di kawasan strategis Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan hasil output dari dokumen Reviu RP2KPKPK kemarin dihasilkan salah satunya luasan kawasan kumuh baru pada tahun 2024 yang sudah terinput di aplikasi SIKAWANKU (Sistem Informasi Kawasan Kumuh) yaitu seluas 173,13 Ha. Namun luasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah yang dibawah 10Ha yaitu 81,4 Ha dengan luasan penanganan kumuh seluas 8,37 Ha sehingga sisa luasan kumuhnya di tahun 2024 sebesar 73,03 Ha.

LUASAN KUMUH TAHUN 2024

NO	NAMA KAWASAN	LUAS KUMUH AWAL (Ha)	PENANGANAN KUMUH (Ha)	SISA LUASAN KUMUH (Ha)
1	Kawasan Branta Pesisir	8,78	0	8,78
2	Kawasan Bulay	3,14	0	3,14
3	Kawasan Gladak Anyar 1	9,86	0	9,86
4	Kawasan Gladak Anyar 2	0,64	0	0,64
5	Kawasan Kolpajung	3,47	3,47	0
6	Kawasan Jungcangcang1	2,72	2,72	0
7	Kawasan Kowel	5,73	0	5,73
8	Kawasan Larangan Tokol	2,1	0	2,1
9	Kawasan Palengan Laok	5,06	0	5,06
10	Kawasan Panempan	3,48	0,79	2,69
11	Kawasan Parteker	1,04	0	1,04
12	Kawasan Patemon	3,79	1,39	2,4
13	Kawasan Seddur	3,55	0	3,55
14	Kawasan Tamberu	8,19	0	8,19
15	Kawasan Teja Timur	3,86	0	3,86
16	Kawasan Tlontoraja	4,9	0	4,9
17	Kawasan Toronan	6,42	0	6,42
18	Kawasan Waru Barat	4,67	0	4,67
		81,4	8,37	73,03

Aplikasi ini merupakan sebuah sistem pengelolaan, pengolahan dan pemutakhiran data berbasis Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Geographic Information System (GIS) kawasan kumuh yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Pembangunan infrastruktur permukiman seperti pembangunan jalan lingkungan atau pavingisasi di kawasan strategis perdesaan dan perkotaan merupakan bentuk intervensi dan kontribusi pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam upaya penurunan luasan kawasan kumuh.

Berdasarkan tabel diatas luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha yang ditangani adalah sebesar 8,37ha dari total luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha 81,4ha, sehingga sisa luasan kumuh di tahun 2025 yaitu sebesar 73,03ha. Pekerjaan pavingisasi yang merupakan salah satu intervensi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penurunan luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10ha dilaksanakan melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dan juga Program Kawasan Permukiman pada dokumennya. Dari target 535 paket pekerjaan pembangunan jalan lingkungan sudah terealisasi 528 paket pekerjaan yang telah dibangun sampai akhir tahun 2024 sehingga capaian kinerjanya sebesar 98,51% . Capaian kinerja ini semakin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun 2023 capaian kinerjanya 95,06% dan pada tahun 2022 capaian kinerjanya 71,98%.

Perbandingan Capaian Kinerja prosentase Luasan Kawasan Kumuh

TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
71,98%	95,06%	98,51%

Mengevaluasi dari capaian kinerja tahun 2022 kemarin dimana penambahan anggaran pada saat pengesahan PAK, target kinerja juga ditambahkan sedangkan kegiatan fisik tambahannya tidak mungkin dilaksanakan karena mepetnya waktu pengesahan PAK dengan akhir tahun. Sehingga pada tahun 2023 dan tahun 2024 ketika ada perubahan anggaran kegiatan (PAK) targetnya tidak ditambahkan kedalam target kinerja perubahan sehingga capaian kinerja tetap terhadap target sebelum PAK. Untuk tingkat efisiensi pada indikator sasaran ini yaitu sebesar 30,19% dimana capaian anggarannya masih lebih rendah daripada capaian kinerjanya yaitu sebesar 68,32%. Tingginya tingkat efisiensi ini disebabkan karena adanya serapan anggaran yang tidak optimal dikarenakan gagal bayar.

Adapun saran dan rekomendasi perbaikan untuk indikator penurunan luasan kawasan kumuh ini yang mana merupakan indikator strategis dalam upaya peningkatan kualitas permukiman di Kabupaten Pamekasan yaitu mengidentifikasi dan pemutakhiran data luasan kawasan kumuh berbasis spasial (GIS), menyusun Rencana Penataan Kawasan untuk lokasi-lokasi dengan tingkat kekumuhan sedang dan berat, mengusulkan pengajuan dana DAK Tematik bidang permukiman ke pusat, melakukan integrasi program dengan OPD teknis lainnya, legalitas dan penataan aset kawasan

permukiman, serta melibatkan masyarakat setempat dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kawasan.

5. Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan

Indikator sasaran diatas mengacu pada persentase rumah tangga yang memperoleh air bersih dari sumber yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Sumber air minum layak meliputi sambungan rumah dari jaringan perpipaan (PDAM), sumur terlindungi, dan mata air terlindungi. Implementasi dari indicator ini mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan air minum layak di wilayah perkotaan dan perdesaan. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum menjadi penunjang indicator sasaran ini dimana pada tahun 2024 sudah terealisasi 1.273 SR dari target 1.499 SR. sehingga capaian kinerja yang dihasilkan yaitu 84,92%.

Proporsi RT dengan akses air minum layak	=	$\frac{\text{Jumlah RT dengan akses air minum layak jaringan perpipaan}}{\text{Total Jumlah RT}} \times 100\%$
--	---	--

Pengukuran capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya cenderung meningkat karena capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 83,97%.

Perbandingan capaian kinerja proporsi RT yang mendapatkan akses air minum layak jaringan perpipaan

TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
94,63%	77,78%	83,97%	84,92%

Berdasarkan pada tabel perbandingan capaian diatas pada Tahun 2022 capaian kinerjanya menurun. Hal ini dikarenakan adanya Perubahan Anggaran Kegiatan (PAK) yang mana target kegiatannya ikut dimasukkan padahal kegiatan tersebut jelas tidak mungkin dilaksanakan dikarenakan mepetnya waktu pelaksanaan dengan akhir tahun. Karena nilai pembagiannya semakin besar maka berpengaruh pada nilai capaian kinerjanya. Berdasarkan hasil evaluasi penilaian dari 2022 maka tahun 2023 dan tahun 2024 capaian kinerjanya mulai semakin ada peningkatan. Kendati demikian masih ditemukan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan terutama yang terkait dengan pengeboran air bersih. Faktor yang menjadi penghambat diantaranya kurangnya CV/rekanan yang mempunyai alat pengeboran air bersih dan juga untuk melakukan pengeboran harus mengantongi izin dari provinsi, selain itu juga sulit ditemukannya titik lokasi sumber air sehingga kegiatan pembangunan system penyediaan air minum jaringan perpipaan beberapa ada yang tidak terealisasi. Solusi ke depannya mungkin akan mengurangi kegiatan pembangunan SPAM untuk kemudian diperbanyak di kegiatan peningkatan dan perluasan dan optimalisasi SPAM jaringan perpipaan.

Perbandingan Target Nasional dengan Provinsi dan Kab/Kota

Target Nasional	Capaian Nasional	Target Provinsi	Capaian Provinsi	Target Kab/Kota	Capaian Kab/Kota
100,00%		100,00%	96,93%	58,53%	49,71%

Keselarasan Pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur menetapkan target 100% terhadap akses air minum layak perpipaan sebagai bagian dari komitmen pencapaian

Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030. hal ini mencerminkan harapan agar penduduk indonesia memiliki akses air bersih yang aman dan berkelanjutan. Sedangkan pada target Kabupaten/Kota yang rendah 58,53% mengindikasikan bahwa masih adanya keterbatasan dalam penyediaan infrastruktur yang belum mencakup seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan, pendanaan, atau tantangan geografis yang beragam membuat target 100% sulit dicapai dalam jangka pendek. Tingkat efisiensi 16,99% dari indikator sasaran ini dianggap baik disebabkan karena hasil capaian kinerjanya lebih kecil daripada hasil capaian anggarannya yaitu 67,95%. Kondisi efisiensi ini bisa dibilang tidak ideal karena ada serapan anggaran yang tertunda pembayarannya sehingga capaian anggarannya rendah.

Adapun rekomendasi dan saran perbaikan supaya ke depannya bisa lebih meningkat yaitu memperluas jaringan pipa ke wilayah perdesaan yang rawan kekeringan serta permukiman padat perkotaan yang belum terlayani SPAM, mengoptimalkan APBD dengan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum, memberikan subsidi sambungan rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) agar lebih banyak RT yang tersambung ke jaringan air minum layak, serta menetapkan standar pelayanan minimum (SPM) yang jelas dan terukur, terutama soal kualitas air, kontinuitas, dan jangkauan layanan.

6. Proporsi rumah tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan

Indikator sasaran ini merupakan suatu perbandingan rumah tangga yang mendapat akses sanitasi layak (dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah

(IPAL)) dengan rumah tangga seluruhnya. Indikator ini ditunjang dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Pembangunan tangki septik individual di permukiman perdesaan dan tangki septik komunal di lingkungan pondok pesantren pada program air limbah sudah terlaksana semua, namun pada program drainase belum terealisasi semua dari total target 13 lokasi hanya terealisasi 9 lokasi. Hal ini dikarenakan kesiapan lokasi yang terdampak belum siap kejelasan aliran drainasenya, pihak CV/mitra kerja kurang responsive dalam menyikapi hal kegiatan pembangunan sistem drainase lingkungan. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi capaian kinerja indikator sasaran. Sebaliknya lokasi pembangunan dan peningkatan sistem drainase lingkungan yang telah terealisasi mengindikasikan bahwa perencanaan teknisnya berjalan dengan baik mulai dari penetapan lokasi, survey, penyusunan KAK, RAB, desain teknis, ketersediaan mitra kerja atau CV sampai ke pelaksanaan dan pengawasannya berjalan dengan lancar. Adapun realisasi kinerja pada indikator sasaran ini tahun 2024 yaitu 66,65% dari target 68,65% sehingga capaian kinerja tercapai 97,09%.

TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
55,74%	87,74%	97,09%

Apabila dibandingkan capaian kinerjanya dengan tahun sebelumnya maka capaian tahun 2024 cenderung naik. Penurunan capaian kinerja pda tahun 2022 pada tabel diatas disebabkan karena adanya perubahan target dan anggaran kegiatan yang mendekati akhir tahun sehingga target lokasi

kegiatan yang awalnya 8 lokasi menjadi 35 lokasi. Hal ini menyebabkan capaian kinerjanya rendah. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pada tahun 2022 tersebut maka solusi kedepannya tidak perlu menambahkan target kinerja apabila ada perubahan anggaran kegiatan (PAK) yang pengesahannya mepet dengan akhir tahun. Kenaikan capaian kinerja pada tahun 2024 ini bisa dikatakan suatu keberhasilan yang cukup baik, karena diawali dengan perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta SDM yang memiliki kompetensi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder.

Perbandingan Target Nasional dengan Provinsi dan Kab/Kota

Target Nasional	Capaian Nasional	Target Provinsi	Capaian Provinsi	Target Kab/Kota	Capaian Kab/Kota
90,00%		95,00%	85,56%	68,65%	66,65%

Perbedaan target yang cukup signifikan antara target sanitasi layak nasional (90%) dan provinsi (95%) pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan masih menghadapi tantangan dalam penyediaan layanan infrastruktur sanitasi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat masih banyak yang belum mampu membangun fasilitas sanitasi layak sehingga masih banyak juga yang belum mendapatkan akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik yang baik. Penetapan target nasional 90% untuk akses sanitasi layak sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's sampai tahun 2030. Provinsi menetapkan target lebih tinggi yaitu 95%, mencerminkan komitmen dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Dengan mengukur rasio antara capaian penganggaran dan capaian kinerja kegiatan sanitasi akses layak ini maka dapat

diketahui tingkat efisiensi yang dicapai yaitu 10,74% dimana capaian kinerjanya lebih besar daripada capaian anggaran yang diserap, yaitu sebesar 86,35%. Untuk kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2024 solusinya akan dilanjutkan pekerjaannya di tahun berikutnya, dimana kegiatan lanjutan ini bisa dilaksanakan di awal tahun 2025 karena dokumen perencanaannya sudah tersedia.

Adapun saran dan rekomendasi perbaikan pada indikator kinerja ini yaitu ke depannya, diperlukan perencanaan teknis yang lebih matang melalui penyusunan DED(Detail Engineering Design) dan readiness criteria sebelum penetapan lokasi, penguatan mekanisme kontrak berbasis kinerja terhadap mitra kerja dengan penalti jika kontraktor tidak responsif/ tidak mencapai progres yang disepakati, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat dengan melakukan sosialisasi sejak awal kepada warga di lokasi pembangunan agar tidak ada resistensi terkait jalur drainase. Dengan langkah-langkah tersebut, realisasi program drainase di Kabupaten Pamekasan dapat lebih optimal, capaian indikator kinerja meningkat, dan manfaat pembangunan lebih dirasakan masyarakat secara berkelanjutan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagai organisasi perangkat daerah dalam urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman disajikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan**

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024 (TRW 1-4)	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	97,57 %	97,77 %	98,14 %	70,29 %	94,79 %	94,62 %	65,61 %	70,29 %	Capaian cakupan ketersediaan rumah layak huni meningkat dari tahun sebelumnya hal ini disebabkan penetapan target yang sesuai SK Penerima Bantuan Bagi Korban Bencana meskipun ada beberapa CPB yang mundur

		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	0	0%	0%	100%	100%	Capaian indikator kegiatan ini nol atau bisa dikatakan tidak terlaksana karena tidak adanya program relokasi oleh Pemerintah Daerah.
2	Prosentase Tertib penyelenggaraan bangunan gedung		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	78,94 %	90,06 %	33,33 %	66,67 %	105,37 %	29,06 %	33,33 %	66,67 %	Capaian rasio kepatuhan IMB setiap tahunnya meningkat bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antusias pemohon yang tinggi dalam mengurus

												PBG/SLF
3	Prosentase Pemenuhan Bangunan Gedung Pemerintah yang Berkualitas / Laik Fungsi		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	60%	80%	33,33%	66,67 %	56,43%	30,69 %	33%	66,67 %	Capaian rasio bangunan gedung pemerintah yang berkualitas/laik fungsi juga meningkat karena jumlah gedung pemerintah dan sarpras yang dibangun juga meningkat
4	Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	42,02 %	21,01 %	100,00 %	83,33 %	19,97%	99%	100,00 %	83,33 %	Capaian penurunan luasan kawasan kumuh setiap tahunnya semakin berkurang kekumuhannya hal ini karena pembangunan infrastruktur jalan lingkungan di kawasan strategis semakin meningkat jumlahnya

5	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	56,53 %	57,53 %	58,53%	59,53 %	48,31%	55,56 %	58,53%	59,53 %	Capaian akses air minum layak bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan meningkat setiap tahunnya. Ketersediaan sumber air bersih di lokasi kegiatan dan anggaran yang memadai menjadi factor meningkatnya capaian kinerja di bidang air minum
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan akses berkelanjutan terhadap Sanitasi layak di perkotaan dan	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	66,65 %	67,65 %	68,65%	69,65 %	59,35%	66,65 %	68,65%	69,65 %	Capaian akses sanitasi yang layak bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan meningkat cukup lumayan dari tahun sebelumnya, hal ini karena pada tahun 2023 tidak ada perubahan anggaran sehingga penetapan target kinerjanya masih sama

	perdesaan											dengan DPA awal sehingga capaian kinerjanya bisa optimal
--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menghadapi isu penting sebagai berikut:

1. Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan pengembangan kawasan permukiman masih belum terintegrasi;
2. Memastikan pelayanan infrastruktur permukiman dalam kondisi layak dan baik;
3. Pentingnya penyusunan data base sarana prasarana utilitas umum, untuk perencanaan pembangunan kawasan permukiman;
4. Pentingnya segera penetapan ruas jalan lingkungan yang menjadi kewenangan Bidang Kawasan Permukiman untuk menghindari tumpang tindih penanganan jalan lingkungan dengan pemerintah desa;
5. Masih banyaknya rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan hidup sehingga diperlukan rehabilitasi/perbaikan atau pembangunan rumah baru untuk mengatasi isu permasalahan ini;
6. Tingginya tingkat kemiskinan di beberapa wilayah Kabupaten Pamekasan mempengaruhi akses masyarakat terhadap perumahan yang layak huni;
7. Memastikan fasilitas umum sarana sanitasi dan pemetaan sumber air baru dalam kondisi baik;
8. Kebijakan dan Regulasi yang tidak konsisten dapat menjadi hambatan terhadap proses pembangunan perumahan sehingga diperlukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan adanya kebijakan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

2.3.1 Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan sebagai berikut :

1. Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Pemberian rekomendasi untuk menerbitkan PBG Online dan SLF.
3. Pemenuhan kebutuhan pokok air bersih terhadap rumah tangga di kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan.
4. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
5. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur di kawasan strategis di kawasan permukiman kumuh.
6. Penyediaan pelatihan tenaga terampil konstruksi untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas penyedia jasa konstruksi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan difokuskan pada pelayanan perbaikan rumah tidak layak huni, pengembangan dan pengelolaan SPAM, dan pengolahan air limbah domestik yang dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman, mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh dan mencegah stunting di kawasan perdesaan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa permasalahan dan hambatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a. Terbatasnya lahan yang tersedia untuk lokasi pembangunan perumahan dan pemukiman.
- b. Lokasi kegiatan yang masih belum jelas dan cenderung berubah-ubah baik lokasi maupun anggarannya.
- c. Adanya refokusing anggaran di awal tahun membuat sistem perencanaan di SIPD juga berubah sehingga menyebabkan kegiatan fisik belum bisa dilaksanakan.
- d. Perubahan nama penerima bantuan perbaikan RTLH dikarenakan ada yang menolak untuk swadaya dengan alasan tidak ada biaya dan ada juga yang sudah meninggal

2.3.3 Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2025–2029, ditetapkan visi pembangunan Kabupaten Pamekasan yaitu *“BANGKIT BERSAMA UNTUK PAMEKASAN MAJU”* Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kabupaten Pamekasan, yaitu:

MISI I	Mewujudkan transformasi sosial yang produktif melalui sumber daya manusia yang unggul
MISI 2	Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal
MISI 3	Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan
MISI 4	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan lincah untuk pelayanan publik yang responsif terhadap aspirasi masyarakat

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan, sebagai garda depan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-1 dan misi ke-3 Kabupaten Pamekasan yaitu:

Mewujudkan transformasi sosial yang produktif melalui sumber daya manusia yang unggul dan Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Indikator sasaran RPJMD yang juga menjadi indikator tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman mendukung capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur terutama di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Rumah yang Layak Huni serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman.
- b. Masih kurangnya tenaga terampil dan tenaga ahli di bidang konstruksi,
- c. Ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang sehat dan aman di sekitar lokasi tempat bekerja
- d. Memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- e. Pembangunan prasarana air minum berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah penduduk di perdesaan maupun perkotaan.
- f. Meningkatkan pemanfaatan penataan kawasan secara optimal dalam peningkatan daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.
- g. Meningkatkan pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis seiring dengan kesadaran masyarakat akan aspek kesehatan.
- h. Meningkatkan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat terutama di perdesaan

Sedangkan peluang yang ada, antara lain:

- a. Meningkatkan kepedulian dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan perumahan dan permukiman
- b. Mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus dan APBD yang mendukung program prioritas Bupati Kabupaten Pamekasan
- c. Meningkatkan koordinasi dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
- d. Tersedianya pelatihan mengenai teknologi informasi yang mendukung peran serta kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan
- e. Tingginya tingkat kebutuhan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, mengharuskan peningkatan kualitas perencanaan, penyusunan program dan kebijakan, pemutakhiran data , evaluasi kinerja, serta pengalokasian anggaran yang optimal.

2.3.5 Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026

Identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai organisasi yang berperan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan harapan, maka strategi pemecahan masalah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis.
- b. Meningkatkan kualitas penataan bangunan gedung serta lingkungannya.
- c. Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi dalam rangka pengembangan kompetensi di bidang jasa konstruksi.
- d. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien.

- e. Meningkatkan pembangunan perumahan bagi MBR dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh.
- f. Meningkatkan prasarana sarana dan utilitas umum di lingkungan perumahan.
- g. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk daerah rawan kekeringan melalui jaringan perpipaan dan jaringan non perpipaan.
- h. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dan air limbah domestic terpusat skala permukiman.
- i. Menyediakan akses air minum dan akses air limbah di lingkungan pondok pesantren (ECO Pesantren)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Rancangan awal RKPD Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Urusan wajib pelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari 3 program, 3 kegiatan dan 15 sub kegiatan, Urusan Pilihan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman terdiri dari 7 program, 11 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 Program, 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan, sebagai pendukung untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. Secara lebih jelas, rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kabupaten Pamekasan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuh an Dana	
										(Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Kabupaten Pamekasan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	68,09%	Rp13.824.896.667	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Kabupaten Pamekasan	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	68,09%	Rp13.824.896.667	

1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	6 SPAM	Rp13.824.896.667	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	6 SPAM	Rp13.824.896.667	
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	Rp25.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	Rp25.000.000	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kabupaten Pamekasan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	32 Liter/Detik	Rp4.000.000.000	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kabupaten Pamekasan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	32 Liter/Detik	Rp4.000.000.000	

1.03.03.2 .01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kabupaten Pamekasan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	51 Liter/De tik	Rp9.649.896.667	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kabupaten Pamekasan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	51 Liter/De tik	Rp9.649.896.667	
1.03.03.2 .01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	Rp50.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	Rp50.000.000	
1.03.03.2 .01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	Rp50.000.000	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1 Unit	Rp50.000.000	
1.03.03.2 .01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 SR	Rp50.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1 SR	Rp50.000.000	

			Jaringan Perpipaan					Jaringan Perpipaan			
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kabupaten Pamekasan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,78%	Rp10.761.871.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kabupaten Pamekasan	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,78%	Rp10.761.871.000	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	8 SPALD	Rp10.761.871.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	8 SPALD	Rp10.761.871.000	
1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang dioptimalisasi	1 Unit	Rp50.000.000	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang dioptimalisasi	1 Unit	Rp50.000.000	

	Masyarakat										
1.03.05.2 .01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kabupaten Pamekasan	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	96 MA3/Hari	Rp7.811.871.000	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kabupaten Pamekasan	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	96 MA3/Hari	Rp7.811.871.000	
1.03.05.2 .01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kabupaten Pamekasan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	46 MA3/Hari	Rp2.700.000.000	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kabupaten Pamekasan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	46 MA3/Hari	Rp2.700.000.000	
1.03.05.2 .01.0034	Pembinaan Pengembangan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Desa yang Dibina dalam	20 Desa	Rp50.000.000	Pembinaan Pengembangan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Desa yang Dibina dalam	20 Desa	Rp50.000.000	

	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa		Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa		Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
1.03.05.2 .01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kabupaten Pamekasan	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 M3/Hari	Rp25.000.000	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kabupaten Pamekasan	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1 M3/Hari	Rp25.000.000	
1.03.05.2 .01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	Rp50.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	Rp50.000.000	
1.03.05.2 .01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	35 Orang	Rp50.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	35 Orang	Rp50.000.000	

	(SPALD)					(SPALD)					
1.03.05.2 .01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	Rp25.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	Rp25.000.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kabupaten Pamekasan	Luasan genangan air wilayah perkotaan	232,64 Ha	Rp225.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kabupaten Pamekasan	Luasan genangan air wilayah perkotaan	232,64 Ha	Rp225.000.000	
1.03.06.2 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	2 Sistem Drainase	Rp225.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	2 Sistem Drainase	Rp225.000.000	

1.03.06.2 .01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kabupaten Pamekasan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	120 M	Rp150.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kabupaten Pamekasan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	120 M	Rp150.000.000	
1.03.06.2 .01.0020	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1 Sistem Drainase Lingkungan	Rp50.000.000	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1 Sistem Drainase Lingkungan	Rp50.000.000	
1.03.06.2 .01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	Rp25.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	1 Dokumen	Rp25.000.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN	Kabupaten Pamekasan	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota	33,33%	Rp50.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN	Kabupaten Pamekasan	Rasio kepatuhan IMB/PBG kab/ kota	33,33%	Rp50.000.000	

	GEDUNG					GEDUNG					
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	Rp50.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	2 Penyelenggaraan	Rp50.000.000	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp50.000.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp50.000.000	
1.03.08.2	Penyelenggaraan Penerbitan	Kabupaten	Jumlah Penerbitan Persetujuan	200 Dokumen	Rp50.000.	Penyelenggaraan Penerbitan	Kabupaten	Jumlah Penerbitan Persetujuan	200 Dokumen	Rp50.000	

.01.0023	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Pamekasan	Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	n	000	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Pamekasan	Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	n	.000	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Kabupaten Pamekasan	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan	33,33%	Rp16.840 .000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Kabupaten Pamekasan	Persentase Bangunan gedung pada Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan	33,33%	Rp16.840 .000.000	

	NYA		Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik			NYA		Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya kondisi baik			
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	1 Penataan Bangunan	Rp16.840.000.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	1 Penataan Bangunan	Rp16.840.000.000	
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	124 Kawasan	Rp16.840.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	124 Kawasan	Rp16.840.000.000	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Pamekasan	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	94,83%	Rp225.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kabupaten Pamekasan	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	94,83%	Rp225.000.000	

		Kabupaten Pamekasan	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Rp20.000.000		Kabupaten Pamekasan	Rasio Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Rp20.000.000	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	2 Penyele nggaraa n	Rp225.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	2 Penyele nggaraa n	Rp225.000.000	
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	Rp125.000.000	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	50 Orang	Rp125.000.000	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	Rp5.000.000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	25 Lembaga	Rp5.000.000	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi	50 Orang	Rp95.000.000	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator,	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi	50 Orang	Rp95.000.000	

	Teknisi atau Analis		atau Analis yang Dilatih			Teknisi atau Analis		atau Analis yang Dilatih			
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	1 Sistem Informasi	Rp50.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	1 Sistem Informasi	Rp50.000.000	
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	Rp20.000.000	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	Rp20.000.000	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	88,11%	Rp75.000.000	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	0,8811	Rp75.000.000	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan	50 Paket Pekerjaan	Rp10.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan	50 Paket Pekerjaan	Rp10.000.000	

	Kabupaten/Kota		Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			Kabupaten/Kota		Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan			
1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	30 Bangunan Konstruksi	Rp5.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	30 Bangunan Konstruksi	Rp5.000.000	
1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50 Lembaga	Rp50.000.000	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50 Lembaga	Rp50.000.000	
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib	70 Badan Usaha	Rp10.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib	70 Badan Usaha	Rp10.000.000	

	Kabupaten/Kota		Usaha			Kabupaten/Kota		Usaha			
1.03.11.2 .04.0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp75.000.000	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp75.000.000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pamekasan	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	100%	Rp149.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pamekasan	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	100%	Rp149.000.000	
			Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi hasil renstra dan renja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat	100%				Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi hasil renstra dan renja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat	100%		

			waktu					waktu			
			Persentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				Persentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%		
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pamekasan	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4 Perencanaan	Rp149.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Pamekasan	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4 Perencanaan	Rp149.000.000	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp70.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Rp70.000.000	
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	53 Dokumen	Rp5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	53 Dokumen	Rp5.000.000	

			SKPD					SKPD			
1.04.01.2 .01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	53 Dokume n	Rp5.000.0 00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	53 Dokume n	Rp5.000. 000	
1.04.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp69.000. 000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp69.000 .000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	Kabupaten Pamekasan	Persentase dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang ditetapkan	100%	Rp4.121. 694.252	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Kabupaten Pamekasan	Persentase dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang ditetapkan	100%	Rp4.121. 694.252	

	KOTA					/KOTA					
			persentase realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah yang dilaporkan tepat waktu	100%				persentase realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah yang dilaporkan tepat waktu	100%		
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pamekasan	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	Rp4.121.694.252	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Pamekasan	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	Rp4.121.694.252	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 ORANG /BULAN	Rp4.121.694.252	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 ORANG /BULAN	Rp4.121.694.252	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pamekasan	Persentase ASN yang menyusun Perjanjian Kinerja dan SKP sesuai pedoman dan tepat waktu	100%	Rp70.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Pamekasan	Persentase ASN yang menyusun Perjanjian Kinerja dan SKP sesuai pedoman dan tepat waktu	100%	Rp70.000.000	

			Persentase ASN yang melaporkan capaian SKP nya sesuai pedoman dan tepat waktu	100%			Kabupaten Pamekasan	Persentase ASN yang melaporkan capaian SKP nya sesuai pedoman dan tepat waktu	100%		
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pamekasan	Jumlah ASN yang terfasilitasi	63 ORANG	Rp70.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Pamekasan	Jumlah ASN yang terfasilitasi	63 ORANG	Rp70.000.000	
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 ORANG	Rp70.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	63 ORANG	Rp70.000.000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kabupaten Pamekasan	Persentase Sarana dan prasarana penunjang yang terpenuhi	100%	Rp1.876.532.520	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kabupaten Pamekasan	Persentase Sarana dan prasarana penunjang yang terpenuhi	100%	Rp1.876.532.520	
1.04.01.2	Administrasi	Kabupaten	Jumlah sarana yang	5 Sarana	Rp170.00	Administrasi	Kabupaten	Jumlah sarana yang	5 Sarana	Rp170.00	

.06	Umum Perangkat Daerah	Pamekasan	layak fungsi		0.000	Umum Perangkat Daerah	n Pamekasan	layak fungsi		0.000	
1.04.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp5.000.000	
1.04.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Rp35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	Rp35.000.000	
1.04.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Rp22.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket	Rp22.000.000	
1.04.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp28.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp28.000.000	
1.04.01.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	30	Rp80.000.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Kabupaten	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	30	Rp80.000	

.06.0009	dan Konsultasi SKPD	Pamekasan	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	000	dan Konsultasi SKPD	Pamekasan	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	.000	
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pamekasan	Jumlah prasarana yang layak fungsi	3 Prasarana	Rp730.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Pamekasan	Jumlah prasarana yang layak fungsi	3 Prasarana	Rp730.000.000	
1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp640.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp640.000.000	
1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Rp90.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 Unit	Rp90.000.000	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang	3 Jasa Penunjang	Rp696.532.520	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang	3 Jasa Penunjang	Rp696.532.520	

	Daerah		Disediakan			Daerah		Disediakan			
1.04.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Rp6.332.5 20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Rp6.332. 520	
1.04.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	217 Laporan	Rp120.00 0.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	217 Laporan	Rp120.00 0.000	
1.04.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	Rp570.20 0.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	Rp570.20 0.000	
1.04.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pamekasan	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Pemelih araan	Rp280.00 0.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Pamekasan	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Pemelih araan	Rp280.00 0.000	

1.04.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Rp150.00 0.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Rp150.00 0.000	
1.04.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Rp50.000. 000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	Rp50.000. .000	
1.04.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	Rp80.000. 000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	Rp80.000. .000	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kabupaten Pamekasan	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100,00%	Rp1.000. 000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kabupaten Pamekasan	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100,00%	Rp1.000. 000.000	

		Kabupaten Pamekasan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	Rp0		Kabupaten Pamekasan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100,00%	Rp0	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	46,66%	Rp1.000.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	46,66%	Rp1.000.000.000	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	50 Unit Rumah	Rp1.000.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	50 Unit Rumah	Rp1.000.000.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN	Kabupaten Pamekasan	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10	20%	Rp120.000.000	PROGRAM KAWASAN	Kabupaten Pamekasan	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10	20%	Rp120.000.000	

	PERMUKIMAN		ha di Kab/ Kota yang ditangani			PERMUKIMAN		ha di Kab/ Kota yang ditangani			
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kabupaten Pamekasan	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	66,67%	Rp20.000.000	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kabupaten Pamekasan	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	66,67%	Rp20.000.000	
1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp20.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp20.000.000	

1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 Kawasan	Rp50.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 Kawasan	Rp50.000.000	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	Rp50.000.000	Penyusunan/Review/Legalisisi Kebijakan Bidang PKP	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	Rp50.000.000	
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	1 Peningkatan Kualitas	Rp50.000.000	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	1 Peningkatan Kualitas	Rp50.000.000	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan	Kabupaten Pamekasan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	2,9 Ha	Rp50.000.000	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan	Kabupaten Pamekasan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang	2,9 Ha	Rp50.000.000	

	Permukiman Kumuh		yang Diremajakan			Permukiman Kumuh		Diremajakan			
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kabupaten Pamekasan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	1,40%	Rp250.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kabupaten Pamekasan	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	1,40%	Rp250.000.000	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	1 Perbaikan RTLH	Rp250.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	1 Perbaikan RTLH	Rp250.000.000	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	10 Unit Rumah	Rp200.000.000	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	10 Unit Rumah	Rp200.000.000	

	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Ha yang Diperbaiki			Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			
1.04.04.2 .01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	Rp50.000.000	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1 Laporan	Rp50.000.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kabupaten Pamekasan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	26,92%	Rp50.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kabupaten Pamekasan	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	26,92%	Rp50.000.000	
1.04.05.2 .01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kabupaten Pamekasan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman	73,34%	Rp50.000.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kabupaten Pamekasan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman	73,34%	Rp50.000.000	

			yang didukung dengan PSU				an	yang didukung dengan PSU			
1.04.05.2 .01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	Rp50.000. 000	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupate n Pamekasa n	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	Rp50.000 .000	
2.10.5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kabupaten Pamekasan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	73,34%	Rp30.000 .000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kabupate n Pamekasan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	73,34%	Rp30.000 .000	
2.10.5.20	Penyelesaian Masalah Ganti	Kabupaten	Jumlah ganti kerugian dan	1 Koordin	Rp30.000	Penyelesaian Masalah Ganti	Kabupate n	Jumlah ganti kerugian dan	1 Koordin	Rp30.000	

1	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pamekasan	santunan tanah yang diselesaikan	asi	.000	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pamekas an	santunan tanah yang diselesaikan	asi	.000	
2.10.05.2 .01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokume n	Rp30.000. 000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupate n Pamekas an	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokume n	Rp30.000 .000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2025 yang tertuang di dalam RPJMD 2025-2029. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2022 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja sebagai berikut:

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Pamekasan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kabupaten Pamekasan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	14 Liter/Detik	melakukan pengeboran air bersih, pembangunan tandon air, pembangunan hidran, perluasan sambungan pipa dan SR
2	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kabupaten Pamekasan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	15 Liter/Detik	melakukan pembangunan sistem tandonisasi, pembangunan hidran, perluasan sambungan pipa dan SR
3	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang	11 Pondok Pesantren	Pembangunan MCK dan tangki septik komunal di lingkungan Pondok Pesantren

			Dioptimalisasi		
No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
4	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Kabupaten Pamekasan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	120 Meter	Pembangunan saluran drainase lingkungan permukiman padat penduduk
5	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	124 Kawasan	Pembangunan paving jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2025-2029 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi **“Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”**. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, sesuai dengan tema RPJMN IV **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur, melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing”**. Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2025-2029 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

RPJMN 2025-2029 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021.

Dalam Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pamekasan

No	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pamekasan
1	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Keterpaduan Pengembangan Wilayah	Perbaikan layanan infrastruktur dasar dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
2	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Perluasan Lapangan Pekerjaan dan Membangun Keunggulan Ekonomi	Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Industri Kecil Menengah yang Berorientasi pada Penyerapan Pengangguran
		Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan Basis UMKM, Koperasi, MUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	
		Pengentasan Kemiskinan menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui Integrasi Program Lintas Sektor (Cross Cutting Program) secara efektif dan tepat sasaran.

No	Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Pamekasan
		Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, Perkebunan Berbasis Kerakyatan	Peningkatan produksi pertanian yang diimbangi dengan peningkatan nilai tambah (Value Added) petani.
4	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Pelayanan Dasar Berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang iorientasikan pada pembentukan manusia berakhlak, unggul dan berdayasaing serta penurunan AKI-AKB.
5	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis NilaiNilai kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	Internalisasi Nilai-nilai toleransi dan harmonisasi serta edukasi mengenai regulasi yang mendukung ketertiban dan ketentraman masyarakat.
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	
7	Memperkuat Stabilitas Polhunkam dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	Peningkatan SDM Aparatur dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Secara Merata.

Berdasarkan tabel korelasi prioritas nasional, provinsi dan kabupaten diatas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mendukung program prioritas di sektor infrastruktur yaitu perbaikan layanan infrastruktur dasar dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berikut ini adalah program-program nomenklatur Perangkat Daerah yang mendukung perbaikan layanan infrastruktur dasar yaitu :

1. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
2. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah.

3. Program pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase.
4. Program penataan bangunan gedung.
5. Program penataan bangunan dan lingkungannya.
6. Program pengembangan jasa konstruksi
7. Program pengembangan perumahan.
8. Program kawasan permukiman.
9. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
10. Program peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
11. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan

Dalam Mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Pamekasan, tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman masuk pada Misi ke-1 yaitu, Mewujudkan Transformasi Sosial melalui Sumber Daya Manusia yang Unggul dan berkarakter, dan Misi ke-3 yaitu Mengurangi risiko bencana daerah melalui Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula Hitung	Target pada tahun 2026
	Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur permukiman		Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman	IIPP=f(AksesAir Minum, AksesSanitasi, Kualitas Jalan Lingkungan, dan RTLH)	85%
		Meningkatnya Kualitas bangunan gedung sesuai standart	Prosentase tertib penyelenggaraan bangunan gedung	$= \frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung yang Tertib Penyelenggaraan}}{\text{Jumlah Total Bangunan Gedung yang disurvei}} \times 100$	73.34%
		Meningkatnya Akses Perumahan dan Permukiman yang Layak Berkelanjutan	Luas Kawasan Kumuh	Luas Kawasan Kumuh dengan satuan Hektare (Ha)	80,00%
			Cakupan ketersediaan rumah layak huni	$= \frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah}} \times 100$	98,60%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Penilaian SAKIP : Perencanaan Kinerja : 25% Pengukuran Kinerja : 25% Pelaporan Kinerja : 10% Evaluasi Kinerja : 20% Capaian Kinerja : 20%	85

Sumber: IKU Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik dalam menyusun program dan kegiatan untuk tahun 2025 serta merupakan perwujudan dari upaya untuk mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pamekasan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026 dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu sebanyak 12 program, 22 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Adapun program tersebut terdiri dari :

- I. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- II. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyedia air minum
- III. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- IV. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
- V. Program penataan bangunan gedung
- VI. Program penataan bangunan dan lingkungannya
- VII. Program pengembangan jasa konstruksi
- VIII. Program pengembangan perumahan
- IX. Program kawasan permukiman
- X. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
- XI. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
- XII. Program program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Pamekasan
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Kabupaten Pamekasan	68,09%	Rp13.824.896.667	APBD		68,59%	Rp11.936.893.050
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	6 SPAM	Rp13.824.896.667	APBD		6 SPAM	Rp11.936.893.050

1.03.03. 2.01.00 25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen	Rp25.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp150.000.000
1.03.03. 2.01.00 26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kabupaten Pamekasan	32 Liter/Detik	Rp4.000.000.000	APBD		10 Liter/Detik	Rp2.500.000.000
1.03.03. 2.01.00 28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kabupaten Pamekasan	51 Liter/Detik	Rp9.649.896.667	APBD		48 Liter/Detik	Rp8.486.893.050
1.03.03. 2.01.00 30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Kabupaten Pamekasan	1 Unit	Rp50.000.000	APBD		1 Unit	Rp100.000.000
1.03.03. 2.01.00 31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Kabupaten Pamekasan	1 Unit	Rp50.000.000	APBD		1 Unit	Rp200.000.000
1.03.03. 2.01.00 32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kabupaten Pamekasan	1 SR	Rp50.000.000	APBD		12 SR	Rp500.000.000

1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kabupaten Pamekasan	95,78%	Rp10.761.871.000	APBD		96,06%	Rp11.011.871.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	8 SPALD	Rp10.761.871.000	APBD		13 SPALD	Rp11.011.871.000
1.03.05.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang dioptimalisasi	Kabupaten Pamekasan	1 Unit	Rp50.000.000	APBD		1 Unit	Rp50.000.000
1.03.05.2.01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	Kabupaten Pamekasan	96 MA3/Hari	Rp7.811.871.000	APBN		96 MA3/Hari	Rp7.811.871.000
1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	Kabupaten Pamekasan	46 MA3/Hari	Rp2.700.000.000	APBD		48 MA3/Hari	Rp2.500.000.000

1.03.05. 2.01.00 34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten Pamekasan	20 Desa	Rp50.000.000	APBD		15 Desa	Rp100.000.000
1.03.05. 2.01.00 33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kabupaten Pamekasan	-	-	APBD		40 Rumah Tangga	Rp100.000.000
1.03.05. 2.01.00 36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	Kabupaten Pamekasan	1 M3/Hari	Rp25.000.000	APBD		1 M3/Hari	Rp100.000.000
1.03.05. 2.01.00 38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kabupaten Pamekasan	2 Unit	Rp50.000.000	APBD		2 Unit	Rp100.000.000
1.03.05. 2.01.00 40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten Pamekasan	35 Orang	Rp50.000.000	APBD		35 Orang	Rp100.000.000
1.03.05. 2.01.00 41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen	Rp25.000.000	APBD		2 Dokumen	Rp150.000.000

1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan genangan air wilayah perkotaan	Kabupaten Pamekasan	233,78 Ha	Rp225.000.000	APBD		-	-
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	Kabupaten Pamekasan	2 Sistem Drainase	Rp225.000.000	APBD		-	-
1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	Kabupaten Pamekasan	120 M	Rp150.000.000	APBD		-	-
1.03.06.2.01.0020	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	Kabupaten Pamekasan	1 Sistem Drainase Lingkungan	Rp50.000.000	APBD		-	-
1.03.06.2.01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen	Rp25.000.000	APBD		-	-
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	46,66%	Rp100.000.000	APBD		59,99%	Rp3.200.000.000

1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	2 Penyelenggaraan	Rp100.000.000	APBD		2 Penyelenggaraan	Rp3.200.000.000
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen	Rp50.000.000	APBD		2 Dokumen	Rp3.000.000.000
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kabupaten Pamekasan	100 Dokumen	Rp50.000.000	APBD		200 Dokumen	Rp200.000.000

1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan di daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	46,66%	Rp16.840.000.000	APBD		59,99%	Rp5.093.261.024
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	1 Penataan Bangunan	Rp16.840.000.000	APBD		1 Penataan Bangunan	Rp5.093.261.024
1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kabupaten Pamekasan	124 Kawasan	Rp16.840.000.000	APBD		25 Kawasan	Rp5.093.261.024
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Kabupaten Pamekasan	95,86%	Rp225.000.000	APBD		96,89%	Rp127.000.000
		Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Kabupaten Pamekasan	100,0%	Rp170.000.000	APBD		100,00%	Rp109.000.000

1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	2 Penyelenggaraan	Rp225.000.000	APBD		2 Penyelenggaraan	Rp127.000.000
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Kabupaten Pamekasan	50 Orang	Rp125.000.000	APBD		300 Orang	Rp127.000.000
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupaten Pamekasan	25 Lembaga	Rp5.000.000	APBD		25 Lembaga	Rp7.500.000
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kabupaten Pamekasan	50 Orang	Rp95.000.000	APBD		300 Orang	Rp97.000.000
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	1 Sistem Informasi	Rp20.000.000	APBD		1 Sistem Informasi	Rp20.000.000
1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Kabupaten Pamekasan	1 Perangkat Pendukung	Rp20.000.000	APBD		1 Perangkat Pendukung	Rp20.000.000

1.03.11. 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	Kabupaten Pamekasan	88,11%	Rp150.000.00 0	APBD		99,14%	Rp89.000.000
1.03.11. 2.04.00 04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kabupaten Pamekasan	50 Paket Pekerjaan	Rp10.000.000	APBD		80 Paket Pekerjaan	Rp12.000.000
1.03.11. 2.04.00 05	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Kabupaten Pamekasan	30 Bangunan Konstruksi	Rp5.000.000	APBD		30 Bangunan Konstruksi	Rp5.000.000
1.03.11. 2.04.00 06	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Kabupaten Pamekasan	50 Lembaga	Rp50.000.000	APBD		50 Lembaga	Rp60.000.000
1.03.11. 2.04.00 07	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Kabupaten Pamekasan	70 Badan Usaha	Rp10.000.000	APBD		80 Badan Usaha	Rp12.000.000
1.03.11. 2.04.00 10	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen	Rp75.000.000	APBD		0 Dokumen	Rp0

	Konstruksi di Kabupaten/Kota								
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	Kabupaten Pamekasan	100,00%	Rp149.000.000	APBD		100%	Rp195.000.000
		Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi hasil renstra dan renja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Kabupaten Pamekasan						
		Persentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	Kabupaten Pamekasan						
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	Kabupaten Pamekasan	4 Perencanaan	Rp149.000.000	APBD		4 Perencanaan	Rp195.000.000
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Pamekasan	3 Dokumen	Rp70.000.000	APBD		3 Dokumen	Rp120.000.000

1.04.01. 2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Pamekasan	56 Dokumen	Rp5.000.000	APBD		56 Dokumen	Rp5.000.000
1.04.01. 2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Pamekasan	56 Dokumen	Rp5.000.000	APBD		56 Dokumen	Rp5.000.000
1.04.01. 2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Pamekasan	4 Laporan	Rp69.000.000	APBD		4 Laporan	Rp65.000.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang ditetapkan	Kabupaten Pamekasan	100%	Rp3.613.315.046	APBD		100%	Rp3.793.146.311
		persentase realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah yang dilaporkan tepat waktu	Kabupaten Pamekasan						

1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	Kabupaten Pamekasan	1 Unit Kerja	Rp3.613.315.046	APBD		1 Unit Kerja	Rp3.793.146.311
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Pamekasan	39 ORANG/BULAN	Rp3.613.315.046	APBD		39 ORANG/BULAN	Rp3.793.146.311
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang menyusun Perjanjian Kinerja dan SKP sesuai pedoman dan tepat waktu	Kabupaten Pamekasan	100%	Rp70.000.000	APBD		100,00%	Rp150.000.000
		Persentase ASN yang melaporkan capaian SKP nya sesuai pedoman dan tepat waktu	Kabupaten Pamekasan						
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	Kabupaten Pamekasan	63 ORANG	Rp70.000.000	APBD		60 ORANG	Rp150.000.000
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Pamekasan	63 ORANG	Rp70.000.000	APBD		63 ORANG	Rp150.000.000
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Sarana dan prasarana penunjang yang terpenuhi	Kabupaten Pamekasan	100,00%	Rp1.876.532.520	APBD		100%	Rp2.068.000.000

	KABUPATEN/KOTA								
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	Kabupaten Pamekasan	5 Sarana	Rp170.000.000	APBD		5 Sarana	Rp342.000.000
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pamekasan	7 Paket	Rp5.000.000	APBD		7 Paket	Rp5.000.000
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pamekasan	50 Paket	Rp35.000.000	APBD		50 Paket	Rp45.000.000
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pamekasan	9 Paket	Rp22.000.000	APBD		9 Paket	Rp42.000.000
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Pamekasan	5 Paket	Rp28.000.000	APBD		5 Paket	Rp50.000.000
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Pamekasan	30 Laporan	Rp80.000.000	APBD		30 Laporan	Rp200.000.000

1.04.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	Kabupaten Pamekasan	1 Prasarana	Rp730.000.000	APBD		1 Prasarana	Rp200.000.000
1.04.01. 2.07.00 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kabupaten Pamekasan	1 Unit	Rp640.000.000	APBD		-	Rp0
1.04.01. 2.07.00 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Pamekasan	50 Unit	Rp90.000.000	APBD		36 Unit	Rp200.000.000
1.04.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan	Kabupaten Pamekasan	3 Jasa Penunjang	Rp696.532.520	APBD		3 Jasa Penunjang	Rp1.051.000.000
1.04.01. 2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Pamekasan	2 Laporan	Rp6.332.520	APBD		2 Laporan	Rp7.000.000
1.04.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Pamekasan	217 Laporan	Rp120.000.000	APBD		217 Laporan	Rp144.000.000
1.04.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Pamekasan	30 Laporan	Rp570.200.000	APBD		38 Laporan	Rp900.000.000

1.04.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Pamekasan	3 Pemeliharaan	Rp280.000.000	APBD		3 Pemeliharaan	Rp475.000.000
1.04.01. 2.09.00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Pamekasan	5 Unit	Rp150.000.000	APBD		5 Unit	Rp175.000.000
1.04.01. 2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kabupaten Pamekasan	50 Unit	Rp50.000.000	APBD		50 Unit	Rp50.000.000
1.04.01. 2.09.00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Pamekasan	19 Unit	Rp80.000.000	APBD		19 Unit	Rp250.000.000
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Kabupaten Pamekasan	100,00%	Rp1.000.000.000	APBD		100,00%	Rp660.000.000
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Kabupaten Pamekasan	100,00%	Rp0	APBD		100%	Rp0

1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	Kabupaten Pamekasan	55,55%	Rp1.000.000.000	APBD		100,00%	Rp660.000.000
1.04.02.2.03.00.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kabupaten Pamekasan	50 Unit Rumah	Rp1.000.000.000	APBD		30 Unit Rumah	Rp660.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	Kabupaten Pamekasan	40,18%	Rp120.000.000	APBD		55,14%	Rp2.000.000.000
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	Kabupaten Pamekasan	73,34%	Rp20.000.000	APBD		80,01%	Rp50.000.000
1.04.03.2.01.00.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen	Rp20.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp50.000.000

1.04.03. 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	Kabupaten Pamekasan	1 Kawasan	Rp50.000.000	APBD		1 Penataan	Rp450.000.000
1.04.03. 2.02.00 08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen	Rp50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp450.000.000
1.04.03. 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	Kabupaten Pamekasan	1 Peningkatan Kualitas	Rp50.000.000	APBD		1 Peningkatan Kualitas	Rp1.500.000.000
1.04.03. 2.03.00 09	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Kabupaten Pamekasan	2,9 Ha	Rp50.000.000	APBD		2,9 Ha	Rp1.500.000.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	Kabupaten Pamekasan	1,40%	Rp250.000.000	APBD		1,06%	Rp0
1.04.04. 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	Kabupaten Pamekasan	1 Perbaikan RTLH	Rp250.000.000	APBD		1 Perbaikan RTLH	Rp0

1.04.04. 2.01.00 01	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kabupaten Pamekasan	10 Unit Rumah	Rp200.000.000	APBD		341 Unit Rumah	7,500,000,000
1.04.04. 2.01.00 07	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kabupaten Pamekasan	1 Laporan	Rp50.000.000	APBD		1 Laporan	50,000,000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kabupaten Pamekasan	26,92%	Rp50.000.000	APBD		32,69%	Rp150.000.000
1.04.05. 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Kabupaten Pamekasan	73,34%	Rp50.000.000	APBD		80,01%	Rp150.000.000

1.04.05. 2.01.00 03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Kabupaten Pamekasan	1 Laporan	Rp50.000.000	APBD		2 Laporan	Rp150.000.000
2.10.5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	Kabupaten Pamekasan	73,34%	Rp30.000.000	APBD		100,00%	Rp350.000.000
2.10.5.2 .01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	Kabupaten Pamekasan	1 Koordinasi	Rp30.000.000	APBD		1 Koordinasi	Rp350.000.000
2.10.05. 2.01.00 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan	1 Dokumen	Rp30.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp50.000.000
2.10.05. 2.01.00 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Kabupaten Pamekasan			APBD		1 Dokumen	Rp50.000.000

2.10.05. 2.01.00 03	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Kabupaten Pamekasan				APBD		1 Laporan	Rp50.000.000
2.10.05. 2.01.00 04	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Kabupaten Pamekasan				APBD		1 Laporan	Rp50.000.000
2.10.05. 2.01.00 05	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Kabupaten Pamekasan				APBD		1 Laporan	Rp50.000.000
2.10.05. 2.01.00 06	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	Kabupaten Pamekasan				APBD		1 Laporan	Rp50.000.000

2.10.05. 2.01.00 07	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Pamekasan			APBD		1 Laporan	Rp50.000.000
---------------------------	--	--	------------------------	--	--	-------------	--	-----------	--------------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2026. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan pada tahun 2026. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2026.

Pendanaan program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Tahun 2026 dan perkiraan maju Tahun 2027, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan pada tahun 2025 dan telah dijabarkan pula ke dalam target dan pagu indikatif per triwulan:

Tabel 4. 1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		Kinerja Renja 2026 (Tahun n)	
			Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5		6		7		8	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIA AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	0,00%	Rp2.764.979.333	14,09%	Rp4.147.469.000	55,57%	Rp4.838.713.833	68,09%	Rp2.073.734.500	68,09%	Rp13.824.896.667
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum yang dikelola dan dikembangkan	6 SPAM	Rp2.764.979.333	6 SPAM	Rp4.147.469.000	6 SPAM	Rp4.838.713.833	6 SPAM	Rp2.073.734.500	6 SPAM	Rp13.824.896.667
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang	0 Dokumen	Rp5.000.000	0 Dokumen	Rp7.500.000	1 Dokumen	Rp8.750.000	0 Dokumen	Rp3.750.000	1 Dokumen	Rp25.000.000

		disusun										
1.03.03.2 .01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	0 Liter/Detik	Rp800.0 00.000	7 Liter/Detik	Rp1.200. 000.000	19 Liter/Detik	Rp1.400. 000.000	6 Liter/Detik	Rp600.0 00.000	32 Liter/Detik	Rp4.000.00 0.000
1.03.03.2 .01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	0 Liter/Detik	Rp1.929. 979.333	10 Liter/Detik	Rp2.894. 969.000	31 Liter/Detik	Rp3.377. 463.833	10 Liter/Detik	Rp1.447. 484.500	51 Liter/Detik	Rp9.649.89 6.667
1.03.03.2 .01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	0 Unit	Rp10.00 0.000	1 Unit	Rp15.00 0.000	0 Unit	Rp17.50 0.000	0 Unit	Rp7.500. 000	1 Unit	Rp50.000.0 00
1.03.03.2 .01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	0 Unit	Rp10.00 0.000	0 Unit	Rp15.00 0.000	1 Unit	Rp17.50 0.000	0 Unit	Rp7.500. 000	1 Unit	Rp50.000.0 00

1.03.03.2 .01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	0 SR	Rp10.00 0.000	0 SR	Rp15.00 0.000	1 SR	Rp17.50 0.000	0 SR	Rp7.500. 000	1 SR	Rp50.000.0 00
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3,81%	Rp549.3 43.550	49,08%	Rp3.845. 404.850	81,48%	Rp4.394. 748.400	95,78%	Rp2.197. 374.200	95,78%	Rp10.761.8 71.000
1.03.05.2 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dikelola dan dikembangkan	8 SPALD	Rp549.3 43.550	8 SPALD	Rp3.845. 404.850	8 SPALD	Rp4.394. 748.400	8 SPALD	Rp2.197. 374.200	8 SPALD	Rp10.761.8 71.000
1.03.05.2 .01.0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang dioptimalisasi	0 Unit	Rp2.500. 000	0 Unit	Rp17.50 0.000	1 Unit	Rp20.00 0.000	0 Unit	Rp10.00 0.000	1 Unit	Rp50.000.0 00
1.03.05.2 .01.0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	5 MA3/Ha ri	Rp390.5 93.550	34 MA3/Ha ri	Rp2.734. 154.850	38 MA3/Ha ri	Rp3.124. 748.400	19 MA3/Ha ri	Rp1.562. 374.200	96 MA3/Ha ri	Rp7.811.87 1.000

1.03.05.2 .01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	3 MA3/Ha ri	Rp135.0 00.000	16 MA3/Ha ri	Rp945.0 00.000	18 MA3/Ha ri	Rp1.080. 000.000	9 MA3/Ha ri	Rp540.0 00.000	46 MA3/Ha ri	Rp2.700.00 0.000
1.03.05.2 .01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0 Desa	Rp2.500. 000	10 Desa	Rp17.50 0.000	10 Desa	Rp20.00 0.000	0 Desa	Rp10.00 0.000	20 Desa	Rp50.000.0 00
1.03.05.2 .01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0 M3/Hari	Rp1.250. 000	0 M3/Hari	Rp8.750. 000	0 M3/Hari	Rp10.00 0.000	1 M3/Hari	Rp5.000. 000	1 M3/Hari	Rp25.000.0 00
1.03.05.2 .01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	0 Unit	Rp2.500. 000	0 Unit	Rp17.50 0.000	0 Unit	Rp20.00 0.000	1 Unit	Rp10.00 0.000	1 Unit	Rp50.000.0 00
1.03.05.2 .01.0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	0 Orang	Rp2.500. 000	35 Orang	Rp17.50 0.000	0 Orang	Rp20.00 0.000	0 Orang	Rp10.00 0.000	35 Orang	Rp50.000.0 00

1.03.05.2 .01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	0 Dokumen	Rp1.250. 000	0 Dokumen	Rp8.750. 000	1 Dokumen	Rp10.00 0.000	0 Dokumen	Rp5.000. 000	1 Dokumen	Rp25.000.0 00
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Luasan genangan air wilayah perkotaan	233,78 Ha	Rp11.25 0.000	233,78 Ha	Rp78.75 0.000	233,78 Ha	Rp90.00 0.000	233,78 Ha	Rp45.00 0.000	233,78 Ha	Rp225.000. 000
1.03.06.2 .01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang dikelola dan dikembangkan	0 Sistem Drainase	Rp11.25 0.000	0 Sistem Drainase	Rp78.75 0.000	2 Sistem Drainase	Rp90.00 0.000	2 Sistem Drainase	Rp45.00 0.000	2 Sistem Drainase	Rp225.000. 000
1.03.06.2 .01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	0 M	Rp7.500. 000	0 M	Rp52.50 0.000	120 M	Rp60.00 0.000	0 M	Rp30.00 0.000	120 M	Rp150.000. 000
1.03.06.2 .01.0020	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	0 Sistem Drainase Lingkungan	Rp2.500. 000	0 Sistem Drainase Lingkungan	Rp17.50 0.000	1 Sistem Drainase Lingkungan	Rp20.00 0.000	0 Sistem Drainase Lingkungan	Rp10.00 0.000	1 Sistem Drainase Lingkungan	Rp50.000.0 00

1.03.06.2 .01.0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	0 Dokumen	Rp1.250.000	0 Dokumen	Rp8.750.000	1 Dokumen	Rp10.000.000	0 Dokumen	Rp5.000.000	1 Dokumen	Rp25.000.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	11,55%	Rp12.500.000	23,56%	Rp62.500.000	35,11%	Rp12.500.000	46,66%	Rp12.500.000	46,66%	Rp100.000.000
1.03.08.2 .01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Koordinasi Bangunan Gedung yang Diselenggarakan	0 Penyelenggaraan	Rp12.500.000	2 Penyelenggaraan	Rp62.500.000	2 Penyelenggaraan	Rp12.500.000	2 Penyelenggaraan	Rp12.500.000	2 Penyelenggaraan	Rp100.000.000
1.03.08.2 .01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	Rp0	1 Dokumen	Rp50.000.000	0 Dokumen	Rp0	0 Dokumen	Rp0	1 Dokumen	Rp50.000.000

1.03.08.2 .01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	25 Dokumen	Rp12.50 0.000	25 Dokumen	Rp12.50 0.000	25 Dokumen	Rp12.50 0.000	25 Dokumen	Rp12.50 0.000	100 Dokumen	Rp50.000.0 00
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan di daerah Kabupaten/Kota	9,41%	Rp3.368.000.000	23,33%	Rp5.052.000.000	37,25%	Rp5.052.000.000	46,66%	Rp3.368.000.000	46,66%	Rp16.840.000.000
1.03.09.2 .01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang diselenggarakan	1 Penataan Bangunan	Rp3.368.000.000	1 Penataan Bangunan	Rp5.052.000.000	1 Penataan Bangunan	Rp5.052.000.000	1 Penataan Bangunan	Rp3.368.000.000	1 Penataan Bangunan	Rp16.840.000.000
1.03.09.2 .01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	25 Kawasan	Rp3.368.000.000	37 Kawasan	Rp5.052.000.000	37 Kawasan	Rp5.052.000.000	25 Kawasan	Rp3.368.000.000	124 Kawasan	Rp16.840.000.000

1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	46,01%	Rp101.250.000	92,03%	Rp101.250.000	95,86%	Rp22.500.000	95,86%	Rp0	95,86%	Rp225.000.000
		Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	44,06%	Rp67.500.000	90,59%	Rp87.500.000	100,00%	Rp15.000.000	100,00%	Rp0	100,00%	Rp170.000.000
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi yang diselenggarakan	3 Penyelenggaraan	Rp101.250.000	3 Penyelenggaraan	Rp101.250.000	3 Penyelenggaraan	Rp22.500.000	3 Penyelenggaraan	Rp0	3 Penyelenggaraan	Rp225.000.000
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	25 Orang	Rp56.250.000	25 Orang	Rp56.250.000	0 Orang	Rp12.500.000	0 Orang	Rp0	50 Orang	Rp125.000.000
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	Rp2.250.000	10 Lembaga	Rp2.250.000	5 Lembaga	Rp500.000	0 Lembaga	Rp0	25 Lembaga	Rp5.000.000

1.03.11.2 .01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	25 Orang	Rp42.75 0.000	25 Orang	Rp42.75 0.000	0 Orang	Rp9.500. 000	0 Orang	Rp0	50 Orang	Rp95.000.0 00
1.03.11.2 .02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	0 Sistem Informasi	Rp0	1 Sistem Informasi	Rp20.00 0.000	0 Sistem Informasi	Rp0	0 Sistem Informasi	Rp0	1 Sistem Informasi	Rp20.000.0 00
1.03.11.2 .02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	0 Perangka t Penduku ng	Rp0	1 Perangka t Penduku ng	Rp20.00 0.000	0 Perangka t Penduku ng	Rp0	0 Perangka t Penduku ng	Rp0	1 Perangka t Penduku ng	Rp20.000.0 00
1.03.11.2 .04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase badan usaha jasa konstruksi yang diawasi	39,01%	Rp67.50 0.000	79,78%	Rp67.50 0.000	88,11%	Rp15.00 0.000	88,11%	Rp0	88,11%	Rp150.000. 000
1.03.11.2 .04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	22 Paket Pekerjaan	Rp4.500. 000	23 Paket Pekerjaan	Rp4.500. 000	5 Paket Pekerjaan	Rp1.000. 000	0 Paket Pekerjaan	Rp0	50 Paket Pekerjaan	Rp10.000.0 00
1.03.11.2 .04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi	13 Banguna n Konstruk	Rp2.250. 000	14 Banguna n Konstruk	Rp2.250. 000	3 Banguna n Konstruk	Rp500.0 00	0 Banguna n Konstruk	Rp0	30 Banguna n Konstruk	Rp5.000.00 0

		Tertib Pemanfaatan Produk	si		si		si		si		si	
1.03.11.2 .04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	22 Lembaga	Rp22.50 0.000	23 Lembaga	Rp22.50 0.000	5 Lembaga	Rp5.000. 000	0 Lembaga	Rp0	50 Lembaga	Rp50.000.0 00
1.03.11.2 .04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	32 Badan Usaha	Rp4.500. 000	32 Badan Usaha	Rp4.500. 000	6 Badan Usaha	Rp1.000. 000	0 Badan Usaha	Rp0	70 Badan Usaha	Rp10.000.0 00
1.03.11.2 .04.0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	0 Dokume n	Rp33.75 0.000	1 Dokume n	Rp33.75 0.000	0 Dokume n	Rp7.500. 000	0 Dokume n	Rp0	1 Dokume n	Rp75.000.0 00
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	Rp240.0 00.000	100%	Rp240.0 00.000	100%	Rp240.0 00.000	100%	Rp280.0 00.000	100,00%	Rp1.000.00 0.000

		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Rp0	100%	Rp0	100%	Rp0	100%	Rp0	100,00%	Rp0
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prosentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	11,20%	Rp240.000.000	22,40%	Rp240.000.000	33,60%	Rp240.000.000	46,66%	Rp280.000.000	46,66%	Rp1.000.000.000
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	12 Unit Rumah	Rp240.000.000	12 Unit Rumah	Rp240.000.000	12 Unit Rumah	Rp240.000.000	14 Unit Rumah	Rp280.000.000	50 Unit Rumah	Rp1.000.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	1,23%		8,36%		34,28%		40,18%		40,18%	Rp120.000.000
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Prosentase Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	0,00%	Rp1.000.000	0,00%	Rp7.000.000	73,34%	Rp8.000.000	73,34%	Rp4.000.000	73,34%	Rp20.000.000

1.04.03.2 .01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	0 Dokume n	Rp1.000. 000	0 Dokume n	Rp7.000. 000	1 Dokume n	Rp8.000. 000	0 Dokume n	Rp4.000. 000	1 Dokume n	Rp20.000.0 00
1.04.03.2 .02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya	1 Kawasan	Rp2.500. 000	1 Kawasan	Rp17.50 0.000	1 Kawasan	Rp20.00 0.000	1 Kawasan	Rp10.00 0.000	1 Kawasan	Rp50.000.0 00
1.04.03.2 .02.0008	Penyusunan/Review/Legal isasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	0 Dokume n	Rp2.500. 000	0 Dokume n	Rp17.50 0.000	1 Dokume n	Rp20.00 0.000	0 Dokume n	Rp10.00 0.000	1 Dokume n	Rp50.000.0 00
1.04.03.2 .03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang ditingkatkan kualitasnya	1 Peningka tan Kualitas	Rp2.500. 000	1 Peningka tan Kualitas	Rp15.00 0.000	1 Peningka tan Kualitas	Rp20.00 0.000	1 Peningka tan Kualitas	Rp12.50 0.000	1 Peningka tan Kualitas	Rp50.000.0 00

1.04.03.2 .03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	0,15Ha	Rp2.500.000	0,87Ha	Rp15.000.000	1,16Ha	Rp20.000.000	0,72Ha	Rp12.500.000	2,9 Ha	Rp50.000.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	0,00%	Rp12.500.000	0,38%	Rp75.000.000	1,02%	Rp100.000.000	1,40%	Rp62.500.000	1,40%	Rp250.000.000
1.04.04.2 .01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan pencegahan	1 Perbaikan RTLH	Rp12.500.000	1 Perbaikan RTLH	Rp75.000.000	1 Perbaikan RTLH	Rp100.000.000	1 Perbaikan RTLH	Rp62.500.000	1 Perbaikan RTLH	Rp250.000.000
1.04.04.2 .01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	0 Unit Rumah	Rp10.000.000	3 Unit Rumah	Rp60.000.000	4 Unit Rumah	Rp80.000.000	3 Unit Rumah	Rp50.000.000	10 Unit Rumah	Rp200.000.000

1.04.04.2 .01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	0 Laporan	Rp2.500. 000	1 Laporan	Rp15.00 0.000	0 Laporan	Rp20.00 0.000	0 Laporan	Rp12.50 0.000	1 Laporan	Rp50.000.0 00
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,00%	Rp10.00 0.000	0,00%	Rp15.00 0.000	26,92%	Rp15.00 0.000	26,92%	Rp10.00 0.000	26,92%	Rp50.000.0 00
1.04.05.2 .01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	0%	Rp10.00 0.000	0%	Rp15.00 0.000	73,34%	Rp15.00 0.000	73,34%	Rp10.00 0.000	73,34%	Rp50.000.0 00
1.04.05.2 .01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	0 Laporan	Rp10.00 0.000	0 Laporan	Rp15.00 0.000	1 Laporan	Rp15.00 0.000	0 Laporan	Rp10.00 0.000	1 Laporan	Rp50.000.0 00
2.10.5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah	0,00%	Rp0	0,00%	Rp0	73,34%	Rp30.00 0.000	0,00%	Rp0	73,34%	Rp30.000.0 00

	UNTUK PEMBANGUNAN											
2.10.5.20 1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	0 Koordina si	Rp0	0 Koordina si	Rp0	1 Koordina si	Rp30.00 0.000	0 Koordina si	Rp0	1 Koordina si	Rp30.000.0 00
2.10.05.2 .01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokume n	Rp0	0 Dokume n	Rp0	1 Dokume n	Rp30.00 0.000	0 Dokume n	Rp0	1 Dokume n	Rp30.000.0 00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun sesuai pedoman dan tepat waktu	95,80%	Rp23.45 0.000	97,48%	Rp44.15 0.000	99,16%	Rp47.60 0.000	100%	Rp33.80 0.000	100%	Rp149.000. 000
		Persentase dokumen pengendalian dan evaluasi hasil renstra dan renja perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%	

		tepat waktu										
		Persentase dokumen pelaporan kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100%	
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4 Perencanaan	Rp23.450.000	4 Perencanaan	Rp44.150.000	4 Perencanaan	Rp47.600.000	4 Perencanaan	Rp33.800.000	4 Perencanaan	Rp149.000.000
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp17.500.000	1 Dokumen	Rp17.500.000	1 Dokumen	Rp17.500.000	0 Dokumen	Rp17.500.000	3 Dokumen	Rp70.000.000
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	56 Dokumen	Rp1.250.000	56 Dokumen	Rp1.250.000	56 Dokumen	Rp1.250.000	56 Dokumen	Rp1.250.000	56 Dokumen	Rp5.000.000
1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	56 Dokumen	Rp1.250.000	56 Dokumen	Rp1.250.000	56 Dokumen	Rp1.250.000	56 Dokumen	Rp1.250.000	56 Dokumen	Rp5.000.000

1.04.01.2 .01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Rp3.450. 000	1 Laporan	Rp24.15 0.000	1 Laporan	Rp27.60 0.000	1 Laporan	Rp13.80 0.000	4 Laporan	Rp69.000.0 00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang ditetapkan	100%	Rp1.032. 375.728	100%	Rp1.032. 375.728	100%	Rp774.2 81.796	100%	Rp774.2 81.796	100%	Rp3.613.31 5.046
		persentase realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah yang dilaporkan tepat waktu	100%		100%		100%		100%		100%	
1.04.01.2 .02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Unit Kerja	Rp1.032. 375.728	1 Unit Kerja	Rp1.032. 375.728	1 Unit Kerja	Rp774.2 81.796	1 Unit Kerja	Rp774.2 81.796	1 Unit Kerja	Rp3.613.31 5.046
1.04.01.2 .02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/B ulan	Rp1.032. 375.728	39 Orang/B ulan	Rp1.032. 375.728	39 Orang/B ulan	Rp774.2 81.796	39 Orang/B ulan	Rp774.2 81.796	39 Orang/B ulan	Rp3.613.31 5.046

1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang menyusun Perjanjian Kinerja dan SKP sesuai pedoman dan tepat waktu	100%	Rp17.50 0.000	100%	Rp17.50 0.000	100%	Rp17.50 0.000	100%	Rp17.50 0.000	100%	Rp70.000.0 00
		Persentase ASN yang melaporkan capaian SKP nya sesuai pedoman dan tepat waktu	100%		100%		100%		100%		100%	
1.04.01.2 .05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang terfasilitasi	15 Orang	Rp17.50 0.000	16 Orang	Rp17.50 0.000	16 Orang	Rp17.50 0.000	16 Orang	Rp17.50 0.000	63 ORANG	Rp70.000.0 00
1.04.01.2 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	Rp17.50 0.000	16 Orang	Rp17.50 0.000	16 Orang	Rp17.50 0.000	16 Orang	Rp17.50 0.000	63 ORANG	Rp70.000.0 00
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sarana dan prasarana penunjang yang terpenuhi	27,16%	Rp256.7 85.000	57,26%	Rp256.7 85.000	80,63%	Rp969.1 45.000	100,00%	Rp303.8 17.520	100,00%	Rp1.876.53 2.520
1.04.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	5 Sarana	Rp42.50 0.000	5 Sarana	Rp42.50 0.000	5 Sarana	Rp42.50 0.000	5 Sarana	Rp42.50 0.000	5 Sarana	Rp170.000. 000
1.04.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2 paket	Rp1.250. 000	2 paket	Rp1.250. 000	2 paket	Rp1.250. 000	1 paket	Rp1.250. 000	7 Paket	Rp5.000.00 0

		Disediakan										
1.04.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	Rp8.750.000	15 Paket	Rp8.750.000	15 Paket	Rp8.750.000	5 Paket	Rp8.750.000	50 Paket	Rp35.000.000
1.04.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	Rp5.500.000	3 paket	Rp5.500.000	2 paket	Rp5.500.000	2 paket	Rp5.500.000	9 Paket	Rp22.000.000
1.04.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp7.000.000	1 Paket	Rp7.000.000	2 Paket	Rp7.000.000	1 Paket	Rp7.000.000	5 Paket	Rp28.000.000
1.04.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp20.000.000	5 Laporan	Rp20.000.000	10 Laporan	Rp20.000.000	10 Laporan	Rp20.000.000	30 Laporan	Rp80.000.000
1.04.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah prasarana yang layak fungsi	1 Prasarana	Rp0	1 Prasarana	Rp0	1 Prasarana	Rp640.000.000	1 Prasarana	Rp0	1 Prasarana	Rp730.000.000
1.04.01.2 .07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	Rp0	0 Unit	Rp0	1 Unit	Rp640.000.000	0 Unit	Rp0	1 Unit	Rp640.000.000

1.04.01.2 .07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp0	50 Unit	Rp90.00 0.000	0 Unit	Rp0	0 Unit	Rp0	50 Unit	Rp90.000.0 00
1.04.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan yang Disediakan	3 Jasa Penunja ng	Rp163.8 30.000	3 Jasa Penunja ng	Rp163.8 30.000	3 Jasa Penunja ng	Rp164.7 10.000	3 Jasa Penunja ng	Rp204.1 62.520	3 Jasa Penunja ng	Rp696.532. 520
1.04.01.2 .08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Rp1.500. 000	2 Laporan	Rp1.500. 000	2 Laporan	Rp1.500. 000	2 Laporan	Rp1.832. 520	2 Laporan	Rp6.332.52 0
1.04.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	54 Laporan	Rp30.00 0.000	54 Laporan	Rp30.00 0.000	54 Laporan	Rp30.00 0.000	55 Laporan	Rp30.00 0.000	217 Laporan	Rp120.000. 000
1.04.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	30 Laporan	Rp132.3 30.000	30 Laporan	Rp132.3 30.000	30 Laporan	Rp133.2 10.000	30 Laporan	Rp172.3 30.000	30 Laporan	Rp570.200. 000
1.04.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Pemeliha raan	Rp50.45 5.000	3 Pemeliha raan	Rp50.45 5.000	3 Pemeliha raan	Rp121.9 35.000	3 Pemeliha raan	Rp57.15 5.000	3 Pemeliha raan	Rp280.000. 000

1.04.01.2 .09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Rp35.82 5.000	5 Unit	Rp35.82 5.000	5 Unit	Rp35.82 5.000	5 Unit	Rp42.52 5.000	5 Unit	Rp150.000. 000
1.04.01.2 .09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp12.50 0.000	10 Unit	Rp12.50 0.000	15 Unit	Rp12.50 0.000	15 Unit	Rp12.50 0.000	50 Unit	Rp50.000.0 00
1.04.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	Rp2.130. 000	3 Unit	Rp2.130. 000	10 Unit	Rp73.61 0.000	3 Unit	Rp2.130. 000	19 Unit	Rp80.000.0 00

BAB V

PENUTUP

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Renja juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pamekasan tahun 2025.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Perumusan program, kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana tertuang pada Renja Pembangunan Daerah (RPJMD) 2025 – 2029;
2. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mengacu pada RKPD

Kabupaten Pamekasan Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga sinkronisasi antar dokumen perencanaan.

3. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan mengacu pada Renstra Kabupaten Pamekasan Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

1. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2026;
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) nantinya dimungkinkan terjadi perubahan mengikuti adanya perubahan RKPD Tahun 2026;

5.3. Rencana tindak lanjut

Rencana Tindak lanjut terhadap Catatan penting dan kaidah pelaksanaan, jika terjadi perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan Tahun 2025.

Pamekasan, 21 Oktober 2025

KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN



MUHARRAM, ST

Pembina Utama Muda
NIP. 19680330 199803 1 006